



SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN  
KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam rangka menyusun rencana strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontinak Nomor 234);

17. Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
12. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II  
MAKSUD, DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 dan sebagai evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesehatan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
- b. untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi;
- c. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel; dan
- d. untuk menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan yang efektif dan efisien.

BAB III  
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH  
Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I : PENDAHULUAN;
  - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
  - BAB III : TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
  - BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
  - BAB V : PENUTUP.
- (2) Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 beserta isi dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Wali Kota yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak.
- (3) Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

- (1) Apabila perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi setelah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan, serta RPJMD Tahun 2025-2029 mengalami perubahan akan dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Tata cara penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

AMIRULLAH

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



FERRY ABDI, S.H., M.H.  
Pembina Tk.I

NIP. 19770211 200212 1 002



**GERMAS**

Gerakan Masyarakat  
Hidup Sehat

# **RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK**

---

## ***2025-2029***



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr.Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Pontianak periode 2025-2029 dapat terselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Pontianak periode 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kota Pontianak periode 2024-2026, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat pusat dan daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional, dan Rencana Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

Selain itu, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Urusan Wajib Bidang Kesehatan Tahun 2025-2029 yang ditangani oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Sektor Kesehatan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kota berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat yang sejalan dengan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Kesehatan Kota Pontianak harus melaksanakannya secara

akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Tujuan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak periode 2025-2029 yaitu “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Pendidikan Yang Berdaya Saing” serta Sasaran Kota Pontianak yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.”

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah sasaran Dinas Kesehatan Kota Pontianak periode 2025-2029 yaitu “Meningkatnya Mutu dan Akses Kesehatan Masyarakat”.

Wassalamu’alaikum.Wr.Wb.

Pontianak, September 2025

## DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	3
	1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
	1.3.1. Maksud .....	4
	1.3.2. Tujuan .....	4
	1.4. Sistematika Penulisan .....	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	8
	2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan .....	8
	2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	8
	2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	19
	2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM)...	26
	2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan .....	43
	2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	46
	<b>2.2.1.</b> Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	46
	<b>2.2.2.</b> Isu Strategis.....	58
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	60
	3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	60
	3.2. Strategi .....	66
	3.3. Arah Kebijakan .....	67

BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	70
	.....	
	4.1. Uraian Program	70
	.....	
	4.2. Uraian Kegiatan	71
	.....	
	4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	108
	.....	
	4.4. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Daerah	151
	.....	
	4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan .....	161
	4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	162
BAB V	PENUTUP	165
	.....	
	.....	
	5.1. Kesimpulan Penting Substansi	165
	.....	
	5.2. Kaidah Pelaksanaan	165
	.....	
	5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah	166
	.....	
	.....	

## DAFTAR TABEL

Halaman	
Standar Target Rasio Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014, 2019 dan 2025 .....	20
Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk Di Kota Pontianak Tahun 2024.....	22
..	22
Daftar Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024 .....	23
Daftar Bangunan (Gedung) pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024.....	24
Gambaran Umum 10 (Sepuluh) Penyakit Terbesar di Kota Pontianak Tahun 2024.....	25
.....	25
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024.....	27
....	27
Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kota Pontianak.....	37
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 .....	40
Angka Wasting Balita Kota Pontianak Tahun 2024 Per Kelurahan.....	50
Sebaran Underweight Kota Pontianak Tahun 2024 .....	53
.....	53
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah.....	58
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025 – 2029 .....	65
.....	65
Penetapan Renstra Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025-2029.....	67
Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 .....	67
.....	67
.....	67

Program Dinas Kesehatan Kota Pontianak.....	66
Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan RENSTRA Dinas Kesehatan .....	74
Indikator Kinerja Daerah Dinas Kesehatan Kota Pontianak.....	105
Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Kota Pontianak .....	119
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025-2029.....	156
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 .....	162
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025-2029.....	163

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024 .....	19
Grafik Trend Kasus kematian Ibu di Kota Pontianak Tahun 2020-2024 .....	47
Grafik Penyebab Kasus Kematian Ibu di Kota Pontianak Tahun 2024 .....	47
Grafik Trend kasus kematian Bayi Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 .....	48
Grafik Penyebab Kematian Bayi Kota Pontianak Tahun 2024.....	49
Angka Wasting Balita Kota Pontianak tahun 2012 – 2024 .....	50
Trend Angka Underweight Balita Di Kota Pontianak Tahun 2013 – 2024 .....	
Konsep Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	53 60
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra.....	62
Rancangan Konsep Indikator RIBK dalam Renstra Dinas Kesehatan.....	63



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan indikator utama kesejahteraan masyarakat. Sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks, mulai dari penyakit tidak menular dan penyakit menular hingga masalah gizi. Berbagai tantangan ini memerlukan penanganan yang terencana, komprehensif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Dinas Kesehatan Kota Pontianak memiliki mandat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan daerah. Fungsi Dinas ini mencakup perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan, serta pengendalian dan pengawasan mutu pelayanan. Dalam kurun waktu 2025–2029, fungsi tersebut dijabarkan secara terencana dalam Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi rujukan utama dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan program penganggaran.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan prinsip integrasi, sinergi, dan sinkronisasi, yang menjembatani antara dokumen perencanaan jangka panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJMD Kota Pontianak 2025–2029. Renstra ini juga berperan penting dalam menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah ke dalam program-program kesehatan daerah secara lebih operasional.

Dalam Renstra ini, Dinas Kesehatan menetapkan sasaran strategis untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Pontianak. Salah satu indikator utamanya adalah

peningkatan usia harapan hidup yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Program dan kegiatan dalam Renstra ini juga diarahkan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 6 Tahun 2024, yang mencakup pelayanan dasar mulai dari kesehatan ibu-anak, usia pendidikan, produktif, lansia, hingga penyakit prioritas.

Renstra ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), mendukung percepatan penurunan stunting, pengendalian penyakit menular seperti TBC dan HIV, serta mendukung kebijakan nasional seperti Asta Cita keempat Presiden RI tentang pembangunan SDM.

Asta Cita keempat Presiden Republik Indonesia menjadi kompas bagi seluruh pembangunan nasional, termasuk sektor kesehatan. Dalam konteks Renstra Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Asta Cita tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. **Kemandirian:** Membangun sistem kesehatan yang mandiri dan berkelanjutan, tidak bergantung pada pihak luar.
2. **Berkeadilan:** Menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan.
3. **Bersatu:** Membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama.
4. **Berkarya:** Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan dan inovasi dalam pelayanan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan Kesehatan yang merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan

perangkat daerah untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi dan misi Walikota terpilih yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam kurun waktu tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2025-2029 diharapkan mampu menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan tiap tahun. Renstra Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak 2025-2029 dari visi, misi dan program kepala daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Pontianak dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dan dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025–2029 merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun

2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 234);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025 – 2029 ini dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya perencanaan pembangunan kesehatan yang integratif, sinergis, dan sinkron baik secara internal maupun eksternal antar dokumen perencanaan pembangunan.

#### 1.3.2 Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2025-2029 adalah:

1. Menyelaraskan arah pembangunan kesehatan daerah dengan RPJMD Kota Pontianak 2025–2029 dan kebijakan nasional.
2. Menjadi pedoman seluruh unit kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam menyusun program, kegiatan, dan anggaran tahunan yang terarah dan terukur.
3. Menjamin efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya menuju peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Renstra Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 mengikuti mekanisme yang tercantum pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029, terdiri dari

5 Bab, dengan rincian sebagai berikut:

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Renstra Dinas Kesehatan Kota Pontianak adalah Dokumen Perubahan Rencana Staretgis Dinas Kesehatan Kota Pontianak periode mulai Tahun 2025-2029 (Lima) Tahun. Di dalamnya terdapat Fungsi Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah, Didalamnya terdapat Proses penyusunan Renstra, Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Renja Dinas Kesehatan.

### 1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan Lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kewenangan Dinas Kesehatan, serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan, serta susunan garis besar isi dokumen Renstra.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

#### 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang Dasar Hukum Pembentukan Dinas Kesehatan, Struktur Organisasi,

serta Uraian Tugas dan Fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang Struktur Organisasi Dinas Kesehatan ditujukan untuk menunjukkan Organisasi, Jumlah Personil, dan Tata Laksanaan Dinas Kesehatan (Proses, Prosedur, Mekanisme).

#### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, mencakup Sumber Daya Manusia., Asset/ Modal, dan Unit Usaha yang masih operasional.

#### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan Tingkat Capaian Kinerja Dinas Kesehatan berdasarkan Sasaran/ Target Renstra Dinas Kesehatan periode sebelumnya, menurut SPM untuk Urusan wajib, dan/atau indikator kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan/atau Indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Memuat penjelasan mengenai kelompok mana saja yang menjadi sasaran layanan Dinas Kesehatan

### 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

#### 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Memuat pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

#### 2.2.2 Isu Strategis

Bagian ini menggambarkan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.

## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029  
Memuat kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Dinas Kesehatan Kota Pontianak, berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029  
Memuat rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Dinas Kesehatan.
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah  
Bagian ini memuat rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program kegiatan subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
- 3.4 Arah Kebijakan  
Rangkaian Kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

#### BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

## BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan

##### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pontianak Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak adalah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas Kesehatan;
- 2) Sekretaris:
  - a. Kepala subbagian umum dan aparatur; dan
  - b. Kepala subbagian perencanaan dan keuangan.
- 3) Kepala bidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian;
- 4) Kepala bidang pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- 5) Kepala bidang bina kesehatan masyarakat;
- 6) Unit pelaksana teknis; dan
- 7) Kelompok jabatan fungsional.

##### 2.1.1.1 Tugas

Dinas Kesehatan Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang kesehatan.

##### 2.1.1.2. Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokok Dinas Kesehatan, maka ditetapkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian

Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

#### 2.1.1.3 Struktur Organisasi

##### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Kesehatan yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif. Uraian Tugas Jabatan Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan Walikota; Perumusan Rencana Kerja dibidang kesehatan
- b. Menetapkan program kerja dan kegiatan dibidang kesehatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; Pengendalian dan Pembinaan Teknis dibidang kesehatan

- c. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dibidang kesehatan dengan unit kerja terkait agar kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- d. Mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan dinas kesehatan kepada Sekretaris, Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien, efektif dan tepat waktu;
- e. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pembangunan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Walikota;
- g. Mengendalikan kegiatan pada dinas mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- h. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekretariat, bidang-bidang dan Jabatan Fungsional pada dinas dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target

kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

- i. Melakukan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan seluruh pelaksana dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun refresif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaporkan kegiatan dibidang kesehatan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- k. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang kesehatan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang kesehatan yang diberikan oleh Walikota.

## 2. Sekretaris

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pontianak mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pontianak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- b. Perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- d. Monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- e. Pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- g. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Uraian Tugas Jabatan Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan program kerja dibidang kesekretariatan berdasarkan sasaran dan rencana kerja Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada para Kepala Subbagian, pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Memberi petunjuk kerja kepada para Kepala Subbagian, pejabat fungsional dan pelaksana yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;

- d. Melakukan pengawasan kepada Kepala Subbagian, pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para Kepala Subbagian, pejabat fungsional dan pelaksana pada sekretariat dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- f. Membantu pimpinan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang yang ada di Dinas sesuai dengan petunjuk pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- i. Melaporkan kegiatan dibidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- j. Mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Kepala Dinas mengenai upaya

pemecahan masalah baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan

- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Di dalam Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak, yaitu:

Ruang lingkup tugas bidang kesekretariatan Dinas Kesehatan Kota Pontianak meliputi:

- a. Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Pontianak mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Pontianak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian;
- b. Perumusan program kerja dibidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian;
- f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian;
- h. Pengelolaan administrasi dibidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dibidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Pontianak meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan,
- b. Kefarmasian dan perbekalan kesehatan,
- c. Sistem informasi, sarana dan prasarana kesehatan.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian mengkoordinasikan tim kerja yang terdiri dari:

- a. Tim Kerja Pelayanan Kesehatan;

- b. Tim Kerja Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
  - c. Tim Kerja Sistem Informasi, Sarana dan Prasarana Kesehatan.
4. Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- b. Perumusan program kerja dibidang pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;

- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- h. Pengelolaan administrasi dibidang pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dibidang pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup pekerjaan Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak meliputi:

- a. Surveilans dan Imunisasi;
- b. Inovasi dan Tenaga Kerja;
- c. Penyehatan Lingkungan;
- d. Penyakit Tidak Menular; dan
- e. Penyakit Menular;

Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mengoordinasikan tim kerja yang terdiri dari:

- a. Tim Kerja Surveilans dan Imunisasi;
- b. Tim Kerja Inovasi dan Tenaga Kerja;
- c. Tim Kerja Penyehatan Lingkungan;

- d. Tim Kerja Penyakit Tidak Menular;
  - e. Tim Kerja Penyakit Menular;
5. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat

Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pontianak mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang bina kesehatan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang bina kesehatan masyarakat;
- b. Perumusan program kerja dibidang bina kesehatan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang bina kesehatan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang bina kesehatan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang bina kesehatan masyarakat;
- f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang bina kesehatan masyarakat;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang bina kesehatan masyarakat;
- h. Pengelolaan administrasi dibidang bina kesehatan masyarakat; dan

- i. Pelaksanaan fungsi lain dibidang bina kesehatan masyarakat; yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pontianak meliputi :

- a. Kesehatan ibu, anak dan reproduksi;
- b. Gizi;
- c. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat mengkoordinasikan tim kerja yang terdiri dari:

- a. Tim Kerja Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Reproduksi;
- b. Tim Kerja Gizi;
- c. Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

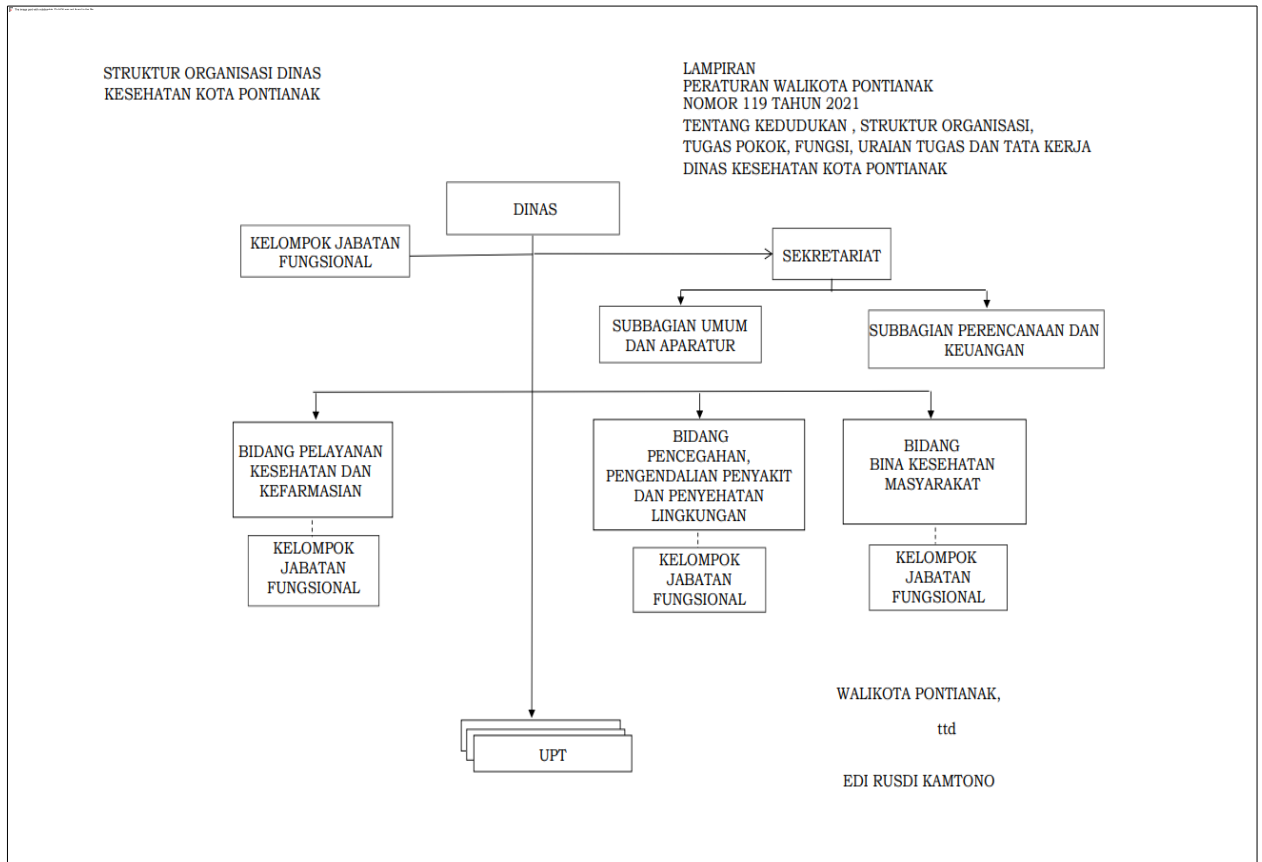
- a. Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- b. Unit pelaksana teknis dinas dapat dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yang ditentukan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Nomenklatur dan jumlah unit pelaksana teknis dinas diusulkan secara tertulis oleh Kepala Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

- d. Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.
  - e. Pembentukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.
  - f. Unit pelaksana teknis dinas Daerah yang pada saat ini sudah terbentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ketentuan tentang pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah ditetapkan.
  - g. Penghapusan atau pencabutan unit pelaksana teknis dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Pontianak berjumlah 27 UPT terdiri dari, 2 RSUD, 23 Puskesmas, 1 Laboratorium Kesehatan, dan 1 Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan keahlian tertinggi yang berada dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas.

- d. Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas akan diatur dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Formasi Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- f. Kelompok Jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- g. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak, sebagai berikut:

Gambar II.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024



Sumber : Lampiran Perwal Nomor 119 Tahun 2021

## 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik bergantung pada kecukupan sumber daya kesehatan. Dengan sumber daya kesehatan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka pelayanan kesehatan diharapkan dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya menghasilkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan semua pihak.

### 2.1.2.1 Sumber Daya Manusia di Lingkungan Dinas Kesehatan

Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan dengan menggunakan metode berdasarkan institusi yakni Analisis

Beban Kerja Kesehatan (ABK.Kes), Standar Ketenagaan Minimal dan Metode berdasarkan wilayah atau Rasio terhadap jumlah penduduk.

Tabel.II.1. Standar target rasio kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014, 2019 dan 2025 (Kepmenko Bidang Kesra No 54 Tahun 2013)

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Target Rasio per 100.000 Penduduk (Kepmenko Bidang Kesra No. 54 Tahun 2013)		
		2014	2019	2025
1	Dokter Spesialis	10	11	12
2	Dokter Umum	40	45	50
3	Dokter Gigi	12	13	14
4	Perawat	158	180	200
5	Bidan	100	120	130
6	Perawat Gigi	15	18	21
7	Apoteker	9	12	15
8	Ass. Apoteker	18	24	30
9	SKM	13	16	18
10	Sanitarian	15	18	20
11	Nutrisionis	10	14	18
12	Keterampilan Fisik	4	5	6
13	Keterampilan Medik	14	16	18

Sumber : RPTK Tahun 2011-2025 (Kepmenko Kesra No.54 Tahun 2013)

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak sampai dengan Maret 2025 seluruhnya berjumlah 1569 orang yang meliputi beberapa Instansi diantaranya Dinas Kesehatan, 23 Puskesmas, Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), Pusat Laboratorium Kesehatan (LABKES), RSUD Sultan Sy. Mohammad Al

Kadrie Kota Pontianak, serta RSUD Pontianak Utara. (Data Subbag Umum dan Aparatur, 2025).

Berikut rincian jumlah pegawai Instansi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak, sebagai berikut :

Dinkes Kota Pontianak	:	91 orang
23 Puskesmas	:	698 orang
Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)	:	13 orang
Pusat Laboratorium Kesehatan	:	9 orang
RSUD Sultan Sy Mohammad Alkadrie	:	645 orang
RSUD Pontianak Utara	:	113 orang
Jumlah	:	1.569 orang

Dari keseluruhan tenaga kesehatan yang ada, 27 orang merupakan pejabat struktural dengan perincian sebagai berikut :

Pejabat Eselon II B	:	1 orang
Pejabat Eselon III A	:	2 orang
Pejabat Eselon III B	:	8 orang
Pejabat Eselon IV A	:	14 orang
Pejabat Eselon IV B	:	2 orang
Jumlah	:	27 orang

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak, maka Dinas Kesehatan Kota Pontianak memiliki 23 (Dua Puluh Tiga) Unit Pusat

Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Unit Pelaksana Teknis Pusat Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak, maka Dinas Kesehatan memiliki 1 (Satu) Unit Laboratorium Kesehatan.

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Mata Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak, maka Dinas Kesehatan juga memiliki 1 (Satu) Unit Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pontianak Utara pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak, maka Dinas Kesehatan memiliki 2 (Dua) Unit Rumah Sakit Umum Daerah.

Adapun informasi Rasio Tenaga Kesehatan di Kota Pontianak per 100.000 Penduduk di Tahun 2023 dengan jumlah Penduduk sebanyak 679.818 jiwa, sebagai berikut:

Tabel.II.2. Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk Di Kota Pontianak Tahun 2024

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah	Rasio Nakes Th. 2024
1.	Dokter Spesialis	300	44,06
2.	Dokter Gigi	169	24,82

3.	Dokter Umum	612	89,89
4.	Fisiotherapy	70	10,28
5.	Perawat	2572	377,76
6.	Bidan	711	104,43
7.	Kesehatan Masyarakat	156	22,91
8.	Kesehatan Lingkungan	122	17,92
9.	Gizi	140	20,56
10	Ahli Laboratorium Medik	400	58,75
11	Apoteker	263	38,63
12	Asisten Apoteker	320	47,00
13	Radiografer	90	13,22
14	Terapis Gigi dan Mulut	142	20,86

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

#### 2.1.2.2 Sarana Prasarana Pendukung di Lingkungan Dinas Kesehatan

Sarana pendukung pelayanan kesehatan terdiri atas tanah, gedung, kendaraan dinas roda empat maupun roda dua. Berikut ini disajikan data sarana pendukung pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan Tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel II.3, sebagai berikut :

Tabel II.3. Daftar Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan	Jumlah
I	Tanah	
A	Kantor Dinas Kesehatan Kota	1
B	Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif	1

		Mohammad Al Kadrie	
	C	Rumah Sakit Umum Daerah Pontianak Utara	1
	D	Unit Pelaksana Teknis Puskesmas	23
	E	UPTD Laboratorium Kesehatan	1
	F	UPTD Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)	1
		Jumlah	28
II	Kendaraan Bermotor		
	A.	Kendaraan Dinas Roda Empat	
		1 Mobil Dinas (Dinas Kesehatan Kota)	5
		2 Pusling & Ambulance (Puskesmas)	18 (3&15)
		3 Ambulance 119 (Dinas Kesehatan Kota)	2
		4 Mobil Dinas (RSUD Kota Pontianak)	23
		5 Ambulance & Mobil Jenazah (RSUD Kota)	4
		Jumlah	52
	B	Kendaraan Dinas Roda Dua	
		1 Dinas Kesehatan Kota & Puskesmas	28
		2 Puskesmas	67
		3 RSUD Kota Pontianak	13
		Jumlah	108

*Sumber : Subbagian Umum dan Aparatur Dinas Kesehatan, 2024*

Sampai dengan tanggal 01 September 2024, Dinas Kesehatan Kota Pontianak memiliki bangunan (gedung) antara lain:

Tabel II.4. Daftar Bangunan (Gedung)  
pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024

No	Keterangan	Jumlah
1	Rumah Dinas tenaga medis dan paramedis Puskesmas	25 unit
2	Rumah Dinas Rumah Sakit	10 unit
3	Gedung Rumah Sakit Umum Daerah	2 unit
4	Gedung Puskesmas	23 unit
5	Gedung Pengelola Farmasi (Puslofar)	1 unit
6	Gedung Laboratorium Kesehatan	1 unit
7	Gedung Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)	1 unit
8	Gedung Posyandu Permanen	29 unit
9	KPA (Komisi Penanggulangan AIDS )	1 unit

*Sumber : Subbagian Umum dan Aparatur Dinas Kesehatan, 2024*

Sarana kesehatan lainnya yang berada di Kota Pontianak yang juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Pontianak terkait Pelaporan adalah Laboratorium Kesehatan Provinsi dan UPELKES yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) serta Politeknik Kesehatan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkes Pusat, dan Balai Kesehatan Paru-paru.

Disamping tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, terdapat pula sarana pelayanan

kesehatan milik TNI/POLRI dan swasta antara lain : RSUD Dr. Soedarso, RSUD Syarif Mohammad Al Kadrie, RS Universitas Tanjungpura, RSU St Antonius, RS Bhayangkara, RS Yarsi, RS Promedika, RS Kharitas Bakti, RS Mitra Medika, RS Bersalin Nabasa, RS Anugrah Bunda Khatulistiwa, dan RS Jeumpa.

2.1.2.3. Gambaran Umum 10 Penyakit Terbesar di Kota Pontianak  
Adapun gambaran umum 10 (sepuluh) Penyakit terbesar yang ditangani Puskesmas di Kota Pontianak, pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5. Gambaran Umum 10 (Sepuluh) Penyakit Terbesar di Kota Pontianak Tahun 2024

No.	JENIS PENYAKIT	2024
1	Esensial (primer) hipertensi	25.903
2	Acute Nasopharyngitis (Common Cold)	21.308
3	Acute Upper Respiratory Infection, Unspecified / ISPA	20.406
4	Dyspepsia	13.649
5	Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus	9.592
6	Counselling Unspecified	8.701
7	Pulpitis	5.324
8	Acute Upper Respiratory Infection of Multiple and Unspecified Sites	4.070
9	Acute Pharyngitis	3.809
10	Myalgia	2.389
	Jumlah	115.151

*Sumber : Dinas Kesehatan 2024*

Dari data diatas, maka dapat dilihat bahwa dari 10 (sepuluh) penyakit terbesar di Kota Pontianak, kasus tertinggi di Tahun 2024 adalah Esensial (primer) hipertensi, sebesar 25.903 kasus, sedangkan penyakit dengan jumlah kasus terendah adalah Myalgia, sebesar 2.389 kasus.

Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Pontianak berupaya untuk dapat menekan kenaikan jumlah kasus penyakit-penyakit tersebut, dengan melakukan beberapa upaya preventif dan promotif, melalui pelaksanaan program, kegiatan, serta subkegiatan yang disusun melalui Dokumen Perencanaan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025-2029.

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan kesehatan, target yang telah dicapai, serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hal ini dapat ditemukan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik yang dapat dilihat pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut gambaran kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel.II.6, sebagai berikut:

Tabel II.6  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Kota Pontianak Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Indikator Kinerja Utama (Th. 2020-2022)																		
1	Angka Kematian Ibu	√	-	-	49,50 per 100.000 KH	49,00 per 100.000 KH	48,50 per 100.000 KH	-	-	72,12 per 100.000 KH	53,30 per 100.000 KH	61,47 per 100.000 KH	-	-	1,46	1,09	1,27	-	-
2	Angka Kematian Bayi	√	-	-	2,40 per 1000 KH	2,23 per 1000 KH	2,25 per 1000 KH	-	-	2,16 per 1000 KH	1,87 per 1000 KH	2,11 per 1000 KH	-	-	0,90	0,84	0,94	-	-
3	Persentase Orang Terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	√	-	-	100%	100%	100%	-	-	46,09 %	62,07 %	87,31 %	-	-	0,46	0,62	0,87	-	-
4	Insiden Rate HIV	√	-	-	<0.015%	<0.015 %	0,02%	-	-	0,02%	0,013 %	0,01%	-	-	1,43	0,93	0,50	-	-
5	Insiden Rate DBD	√	-	-	< 49 per 100.000 pddk	< 49 per 100.000 pddk	< 49 per 100.000 pddk	-	-	4,12%	2,38%	5,53%	-	-	0,09	0,05	0,12	-	-
6	Prevalensi Penderita Hipertensi di	√	-	-	30%	28%	27%	-	-	0,25%	0	10,94 %	-	-	0,01	0	0,41	-	-

	Kota Pontianak																		
7	Prevalensi Penderita Diabetes Mellitus di Kota Pontianak	√	-	-	2,60%	2,50%	2,40%	-	-	0,42%	0	1,57%	-	-	0,16	0	0,65	-	-
8	Angka Stunting Balita	√	-	-	21%	21%	17%	-	-	8,73%	12,38	15,77%	-	-	0,42	0,59	0,93	-	-
9	Angka Wasting Balita	√	-	-	12%	10%	7,50%	-	-	3,50%	5,19%	7,75%	-	-	0,29	0,52	1,03	-	-
10	Angka Underweight Balita	√	-	-	14%	13%	12,00%	-	-	7,06%	9,61%	14,74%	-	-	0,5	0,74	1,23	-	-
11	Akreditasi Fasilitas Kesehatan	√	-	-	100%(Utama/ Paripurna= 1 Puskesmas	100%(Utama / Paripurna= 1 Puskesmas)	100%(Utama/ Paripurna= 1 Puskesmas	-	-	NA	50%	NA	-	-	NA	0,5	NA	-	-
	Indikator Program (Th.2020)																		
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	-	√	√	100%					90%					0,9				
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)	-		√	100%					92%					0,92				

3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	-	√	√	100%					92%					0,92				
4	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik	-	√	√	100%					61%					0,61				
5	Cakupan komplikasi neonatus yang ditangani	-	√	√	100%					73%					0,73				
6	Cakupan komplikasi kebidanan ditangani	-	√	√	100%					96%					0,96				
7	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (SPM)	-	√	√	100%					70%					0,7				
8	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	-	√	√	100%					48%					0,48				
9	Persentase upaya kesehatan yang mendapatkan dukungan operasional	-	√	-	100%					100%					1,00				

10	Angka Bebas Jentik	-	√	-	95%					73%					0,77				
11	Cakupan Penemuan Terduga TBC yang dilakukan screening	-	√	-	100%					46%					0,46				
12	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	-	√	-	100%					87%					0,87				
13	Persentase penderita kusta yang Release From Treatment (RFT)	-	√	-	100%					100%					1,00				
14	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	-	√	-	100%					69%					0,69				
15	Persentase Anak Usia 0-11 Bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	-	√	-	93,50%					54%					0,58				
16	Persentase Jamaah Calon Haji yang terdeteksi	-	√	-	100%					100%					1,00				

	faktor resiko kesehatan																	
17	Cakupan Penemuan kasus non polio AFP	-	√	-	3 Kasus					1 Kasus					0,33			
18	Persentase Penyelidikan Epidemiologi (PE) < 24 jam pada Kelurahan yang mengalami KLB	-	√	-	100%					100%					1,00			
19	Persentase Kelurahan yang Open Defecation Free ( ODF )	-	√	-	45%					55%					1,28			
20	Persentase Sarana Air Minum yang memenuhi persyaratan sesuai standar	-	√	-	100%					100%					1			
21	Persentase Tempat fasilitas Umum yang memenuhi syarat kesehatan	-	√	-	78%					75%					0,96			
22	Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi	-	√	-	34%					60%					1,76			

	syarat kesehatan																		
23	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	-	√	-	100%					25%					0,25				
24	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	-	√	-	100%					42%					0,42				
25	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	-	√	-	100%					67%					6,70				
26	Persentase WUS Usia 30-50 Tahun yang Melakukan Pemeriksaan Deteksi Dini kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim	-	√	-	100%					1%					0,01				

27	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	-	√	-	100%					37%					0,37				
28	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	-	√	-	100%					52%					0,52				
29	Cakupan Keluarga yang ber PHBS	-	√	-	60%					65%					1,08				
30	Persentase Sekolah yang melaksanakan PHBS	-	√	-	50%					72%					1,44				
31	Persentase Posyandu Purnama Mandiri	-	√	-	65%					71%					1,09				
32	Indeks Keluarga Sehat	-	√	-	22%					22%					1,00				
33	Persentase Balita dengan masalah gizi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	-		-	100%					84%					0,84				

34	Persentase Bayi dengan Berat badan lahir rendah (BBLR) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	-	-	2%						99%					49,5			
35	Persentase Balita yang ditimbang Berat Badannya (D/S)	-	√	-	71%					37%					0,52			
36	Persentase Remaja Putri dapat tablet tambah darah	-	√	-	56%					32%					0,57			
37	Persentase Ibu hamil KEK dapat makanan tambahan	-	√	-	86%					98%					1,14			
38	Persentase Balita kurus dapat makanan tambahan	-	√	-	74%					98%					1,32			
39	Cakupan industri pangan Rumah tangga yang memiliki sertifikat PIRT	-	√	-	80%					88%					1,10			
40	Persentase Sarana farmasi sesuai standar	-	√	-	100%					100%					1,00			

41	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan kefarmasian sesuai standar	-	√	-	100%					100%					1,00				
42	Persentase Puskesmas yang menggunakan obat secara rasional	-	√	-	100%					100%					1,00				
43	Cakupan masyarakat miskin dan kelompok tertentu yang mendapat jaminan kesehatan	-	√	-	100%					97%					0,97				
44	Persentase Sarana bangunan UPTD/UPK dan jaringannya yang memenuhi syarat	-	√	-	40%					34%					0,85				
45	Persentase jenis pelayanan kesehatan yang memiliki SP dan SOP	-	√	-	100%					100%					1,00				

46	Persentase puskesmas dan UPTD dengan ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan sesuai standar	-	√	-	100%					100%					1,00				
47	Jumlah UPTD/UPK yang memberikan pelayanan sesuai standar	-	√	-	25 UPTD/UPK					25 UPTD / UPK					1,00				
48	Persentase kecukupan data dan informasi kesehatan	-	√	-	100%					100%					1,00				
49	Persentase FKTP yang melaksanakan sistem informasi kesehatan	-		-	100%					100%					1,00				
50	Persentase kecukupan Sarana dan prasarana RSUD	-	√	-	100%					100%					1,00				
51	Persentase Sistem informasi RS dan Media Promosi Penyuluhan sesuai standar	-	√	-	71%					76%					1,07				

52	Persentase Sarana dan prasarana RSUD berfungsi dengan baik	-	√	-	100%					100%					1,00				
53	Persentase Rumah Sakit yang sudah melakukan simulasi Akreditasi Nasional	-	√	-	100%					0%					0,00				
54	Persentase Tenaga kesehatan RS yang profesional, dan memenuhi standar kompetensi	-	√	-	81%					100%					1,23				
55	Terwujudnya tata kelola administrasi dan manajemen RS	-	√	-	100%					100%					1,00				
56	Nilai tingkat kepuasan masyarakat	-	√	-	100%					94%					0,94				
	Indikator Kinerja Program (Th.2021-2022)																		
1	Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu hamil dan	-	√	-		87%	90%				100%	100%			1,15	1,11			

	bayi baru lahir																		
2	Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan kesehatan balita	-	√	-		92%	95%				100%	100%				1,09	1,05		
3	Persentase Puskesmas yg melaksanakan usia anak sekolah dan remaja	-	√	-		92%	95%				100%	100%				1,09	1,05		
4	Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	-	√	-		85%	90%				100%	100%				1,18	1,11		
5	Persentase Fasilitas Kesehatan sesuai standar	-	√	-		100%	100%				100%	100%				1,00	1,00		
6	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan reproduksi	-	√	-		100%	100%				100%	100%				1,00	1,00		

7	Ratio Dokter, Perawat, dan Bidan	-	√	-		2,3 per 1.000 Penduduk	2,3 per 1.000 Penduduk				4%	5%				1,74	2,17		
8	Jumlah Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar	-	√	-		90%	90%				100%	100%				1,11	1,11		
9	Persentase Fasilitas Kesehatan Farmasi, makan, minuman sesuai standar	-	√	-		90%	90%				100%	100%				1,11	1,11		
10	Persentase tatanan kota sehat yang telah dilaksanakan	-	√	-		90%	90%				100%	28,57 %				1,11	0,32		
	Indikator Kinerja Utama (Th. 2023-2024)																		
1	Angka Kematian Ibu	√	-	-				175,62 per 100.000 KH	158,06 per 100.000 KH				95,68 per 100.000 KH	118,57 per 100.000 KH				0,54	0,75
2	Angka Kematian Bayi	√	-	-				2,23 per 1.000 KH	2,11 per 1.000 KH				7,94 per 1.000 KH	7,75 per 1.000 KH				3,56	3,67
3	Persentase Penderita TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	√	-	-				100%	100%				87,79%	106,69 %				0,88	1,07

4	Prevalensi (2023) /Persentase (2024) Penderita Hipertensi di Kota Pontianak	√	-	-				0%	100%				0,15%	48,69%				1,87	0,48
5	Persentase Wasting Balita	√	-	-				7%	7,00%				2,98%	2,84%				0,41	0,4
6	Fasyankes Pemerintah yang Terakreditasi	√	-	-				100%	100%				96,30%	100%				0,96	1
	Indikator Kinerja Program (Th. 2023-2024)																		
1	Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir	-	√	-					100%				100%	100%				1,05	1
2	Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan kesehatan balita	-	√	-					100%				100%	100%				1,03	1
3	Persentase Puskesmas yg melaksanakan usia anak sekolah dan remaja	-	√	-					100%				100%	100%				1,03	1

4	Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	-	√	-					100%				100%	100%				1,05	1
5	Persentase Fasilitas Kesehatan sesuai standar	-	√	-					100%				100%	100%				1	1
6	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan reproduksi	-	√	-					100%				100%	100%				1	1
7	Persentase Capaian SPM Rumah Sakit	-	√	-					100%				68,47%	75,61%				0,86	0,89
8	Ratio Dokter, Perawat, dan Bidan	-	√	-					100%				5,98 per 1.000 Penduduk	2,88 per 1.000 Penduduk				2,6	1,25
9	Jumlah Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar	-	√	-					100%				100%	100%				1,11	1,11
10	Persentase Fasilitas Kesehatan Farmasi, makan, minuman sesuai standar	-	√	-					100%				100%	100%				1,11	1,11

11	Persentase tatanan kota sehat yang telah dilaksanakan	-	√	-					100%				29%	NA				0,3	-
----	---	---	---	---	--	--	--	--	------	--	--	--	-----	----	--	--	--	-----	---

SPM kesehatan merupakan acuan bagi pemerintah daerah untuk memastikan setiap warga negara di wilayahnya memperoleh pelayanan dasar yang berkualitas, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. dengan memprioritaskan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan di seluruh Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya di Kota Pontianak. Tujuannya adalah memastikan setiap warga Pontianak, dari bayi hingga lansia, mendapatkan pelayanan kesehatan yang esensial, berkualitas, dan tepat waktu.

Dalam konteks perencanaan strategis saat ini, peraturan terbaru yang menjadi acuan utama Dinas Kesehatan Kota Pontianak terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Peraturan ini secara resmi mencabut dan menggantikan Permenkes sebelumnya, yaitu Permenkes Nomor 4 Tahun 2019. Dengan adanya Permenkes terbaru ini, Pemerintah Daerah, termasuk Dinas Kesehatan Kota Pontianak, wajib menyesuaikan seluruh program dan kegiatan yang terkait dengan SPM.

Perubahan utama yang dibawa oleh Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 ini adalah:

1. Penyempurnaan Indikator dan Target: Permenkes ini melakukan penyesuaian pada indikator dan target capaian untuk setiap jenis pelayanan dasar, dengan tujuan meningkatkan mutu dan efektivitas pelayanan kesehatan.
2. Penekanan pada Data dan Pelaporan: Adanya penyesuaian pada format pelaporan untuk memastikan data yang dikumpulkan lebih akurat dan dapat digunakan untuk evaluasi serta perencanaan yang lebih baik.

Dengan berpedoman pada Permenkes Nomor 6 Tahun 2024, Renstra Dinas Kesehatan Kota Pontianak 2025-2029 akan disusun untuk memastikan bahwa 12 jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM dapat dipenuhi secara optimal bagi seluruh warga Pontianak.

Adapun realisasi pencapaian SPM Pelayanan Dasar pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam kurun waktu lima tahun pada tabel berikut :

Tabel II.6  
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan  
Kota Pontianak Tahun 2020-2024

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal (Th. 2020-2024)	Target Indikator SPM Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian SPM pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil	100%	100%	100%	100%	100%	90,12%	93,81%	96,77%	98,16%	94,57%	0,9	0,94	0,97	0,98	0,95
2	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan	100%	100%	100%	100%	100%	91,90%	92,57%	95,73%	99,40%	92,79%	0,92	0,93	0,96	0,99	0,93
3	Presentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%	100%	100%	91,69%	92,25%	95,38%	99,54%	95,73%	0,92	0,92	0,95	1	0,96
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	69,70%	83,15%	84,02%	95,24%	73,85%	0,7	0,83	0,84	0,95	0,74
5	Presentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	47,54%	36,33%	66,75%	94,79%	99,14%	0,48	0,36	0,67	0,95	0,99
6	Presentase orang Usia 15 - 59 Tahun mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	37,22%	29,71%	71,61%	56,77%	56,84%	0,37	0,3	0,72	0,57	0,57

7	Presentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	51,82%	56,91%	62,35%	74,57%	73,89%	0,52	0,57	0,62	0,75	0,74
8	Presentase Penderita Hipertensi mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	25,38%	20,72%	33,34%	44,60%	48,69%	0,25	0,21	0,33	0,45	0,49
9	Presentase Penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	42,35%	37,84%	57,99%	72,16%	83,85%	0,42	0,38	0,58	0,72	0,84
10	Presentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	67,10%	58,06%	66,31%	76%	81,89%	0,67	0,58	0,66	0,76	0,82
11	Presentase Orang Terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	46,09%	62,07%	87,31%	74,80%	99,42%	0,46	0,62	0,87	0,75	0,99
12	Presentase Orang dengan risiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan deteksi dini HIV sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	87,43%	99,47%	100%	100%	93,92%	0,87	0,99	1	1	0,94

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2020- 2024

Kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan diturunkan berdasarkan *Logic Model Theory*. Penyusunan program dan kegiatan harus di dasarkan pada dampak (impact) dan keluaran (output) untuk menghasilkan perencanaan yang maksimal dalam rangka pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis pada tingkat Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan OPD yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Dengan adanya anggaran tersebut, kita dapat merencanakan suatu kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan, serta mengidentifikasi sumberdaya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan Organisasi selama periode yang dianggarkan atau pertahun. Suatu Program dan kegiatan akan terlaksana jika anggaran sesuai dengan perencanaan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan jangka panjang, pembelanjaan, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya agar kebutuhan tersebut dapat digunakan secara efisien, efektif serta optimal.

Untuk Alokasi dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Bidang Kesehatan di Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024 secara lengkap disajikan pada Tabel.II.7 sebagai berikut:

Tabel II.7  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
 Kota Pontianak Tahun 2020-2024

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2.020	2021	2022	2023	2024	2.020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
	BIDANG KESEHATAN																	
	TAHUN 2020																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.064.848. 641			-	-	6.754.179. 534					0,96						
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	2.733.590. 000			-	-	2.597.947. 360					0,95						
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	176.350.0 00			-	-	176.349.50 0					1,00						
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	94.054.65 0			-	-	64.538.250					0,69						
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	256.276.2 38			-	-	228.591.50 0					0,89						
6	Program Peningkatan Pelayanan Prima	80.423.50 0			-	-	75.988.800					0,94						
7	Program Peningkatan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan	11.556.15 0.362			-	-	11.095.054 .593					0,96						
8	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan	9.739.684. 996			-	-	5.672.647. 579					0,58						
9	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	7.263.476. 826			-	-	7.149.855. 873					0,98						

10	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	2.064.536.250			-	-	2.009.750.468					0,97					
11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	4.593.023.974			-	-	4.053.173.569					0,88					
12	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	2.979.413.000			-	-	2.946.608.748					0,99					
13	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit	30.423.379.114			-	-	29.894.975.802					0,98					
14	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan tempat tempat umum dan makanan	630.750.000			-	-	614.667.250					0,97					
15	Program Pengawasan Obat dan Makanan	194.291.700			-	-	168.197.500					0,87					
16	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	2.015.507.980			-	-	1.938.012.800					0,96					
17	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil,Melahirkan dan Bayi Baru Lahir	1.498.242.950			-	-	1.465.650.675					0,98					
18	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita, Anak UsiaSekolah, dan Remaja	135.780.000			-	-	135.724.500					1,00					
19	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	619.008.355			-	-	615.612.993					0,99					
20	Program Promosi dan Sistem Informasi Rumah Sakit	228.350.000			-	-	224.522.085					0,98					
21	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	558.248.000			-	-	531.182.000					0,95					
22	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.432.338.500			-	-	729.187.425					0,51					

23	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	53.332.384.942			-	-	48.918.858.106					0,92					
24	Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Rujukan	50.790.143.192			-	-	48.370.544.051					0,95					
25	Program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	672.063.080			-	-	608.204.215					0,90					
26	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Manajemen Rumah Sakit	17.880.068.452			-	-	16.238.494.211					0,91					
27	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	19.926.000			-	-	19.793.500					0,99					
28	Program pengembangan sistim informasi kesehatan	89.668.300			-	-	89.296.000					1,00					
	Total Anggaran	209.121.979.002					193.387.608.888					0,92					
	TAHUN 2021-2024																
1	Program Penunjang Uusan Pemerintah Daerah		180.391.845.349	153.177.364.923	261.719.361.817	309.173.431.940		171.452.859.320	150.430.627.091	249.910.814.998	287.945.405.943		0,95	0,98	0,95	0,93	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehataan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		215.745.150.778	193.334.352.204	115.304.249.435	108.461.781.477		172.640.214.027	183.688.052.037	67.808.684.735	94.642.416.806		0,80	0,95	0,59	0,87	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.		276.213.226	53.650.000	133.735.000	977.874.600		237.687.494	50.050.000	128.865.000	884.589.400		0,86	0,93	0,96	0,90	
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.		498.524.616	401.857.285	572.404.225	714.793.460		386.989.600	397.825.775	553.317.650	698.046.910		0,78	0,99	0,97	0,97	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.		423.890.405	1.610.924.858	766.458.758	387.360.258		416.789.551	407.651.400	709.899.600	334.865.000		0,98	0,25	0,93	0,86	
	Total Anggaran		397.335.624.374	348.578.149.270	378.496.209.235	419.715.241.735		345.134.539.992	334.974.206.303	319.113.581.983	384.505.324.059		0,87	0,96	0,84	0,92	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Pontianak, serta memperhatikan keberadaan 23 Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas), 1 Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Mata Masyarakat (UPT BKMM), 1 Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan (UPT Labkes), dan 2 Rumah Sakit, kelompok sasaran pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk periode tahun 2025-2029 dikategorikan sebagai berikut:

##### 2.1.4.1 Sasaran Langsung

Kelompok sasaran langsung merupakan individu, keluarga, dan komunitas yang secara langsung menerima pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Kelompok ini meliputi:

1. Seluruh Masyarakat Kota Pontianak:
  - a. Bayi dan Balita: Mencakup pelayanan kesehatan preventif (imunisasi, pemantauan tumbuh kembang), kuratif (pengobatan penyakit), dan rehabilitatif.
  - b. Anak Usia Sekolah dan Remaja: Meliputi pelayanan kesehatan preventif (imunisasi lanjutan, skrining kesehatan), promosi kesehatan, dan penanganan masalah kesehatan spesifik remaja.
  - c. Usia Produktif (15-64 tahun): Mencakup pelayanan kesehatan preventif (skrining penyakit tidak menular, konseling kesehatan), kuratif (pengobatan penyakit umum dan spesifik), kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, serta kesehatan kerja.
  - d. Lansia ( $\geq$  60 tahun): Meliputi pelayanan kesehatan preventif (skrining penyakit degeneratif), kuratif (pengobatan penyakit), dan rehabilitatif, serta pelayanan

kesehatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup lansia.

- e. Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas: Mencakup pelayanan kesehatan antenatal care (ANC), persalinan yang aman, dan pelayanan kesehatan postnatal care (PNC) serta pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
- f. Penderita Penyakit Menular: Meliputi pelayanan pencegahan (surveilans, promosi kesehatan), pengobatan, dan pengendalian penyakit menular seperti Tuberkulosis (TB), Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), Demam Berdarah Dengue (DBD), dan penyakit menular lainnya.
- g. Penderita Penyakit Tidak Menular: Meliputi pelayanan pencegahan (promosi kesehatan, deteksi dini), pengobatan, dan pengendalian penyakit tidak menular seperti Hipertensi, Diabetes Mellitus, Penyakit Jantung, Kanker, dan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK).
- h. Penderita Gangguan Kesehatan Jiwa: Meliputi pelayanan pencegahan, deteksi dini, pengobatan, dan rehabilitasi gangguan kesehatan jiwa.
- i. Kelompok Rentan dan Berisiko: Mencakup masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi rendah, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat adat, serta kelompok masyarakat lain yang memiliki risiko kesehatan lebih tinggi.
- j. Pasien dengan Gangguan Penglihatan: Merupakan sasaran spesifik UPT BKMM yang membutuhkan pelayanan kesehatan mata komprehensif.
- k. Masyarakat yang Membutuhkan Pemeriksaan Laboratorium: Merupakan sasaran spesifik UPT Labkes untuk keperluan diagnosis penyakit, surveilans

kesehatan, dan pemeriksaan kesehatan masyarakat lainnya.

1. Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap: Merupakan sasaran pelayanan kuratif di 2 Rumah Sakit di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

#### 2.1.4.2 Sasaran Tidak Langsung

Kelompok sasaran tidak langsung merupakan pihak-pihak yang berperan dalam mendukung dan memengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kota Pontianak. Kelompok ini meliputi:

1. Penyedia Pelayanan Kesehatan:
  - a. Tenaga Kesehatan di UPT Puskesmas (dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan lainnya).
  - b. Tenaga Kesehatan di UPT BKMM (dokter spesialis mata, perawat mata, dan tenaga kesehatan lainnya).
  - c. Tenaga Kesehatan di UPT Labkes (analisis kesehatan, tenaga teknis laboratorium, dan tenaga kesehatan lainnya).
  - d. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit (dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga penunjang medis).
  - e. Pengelola dan Staf Administrasi di seluruh unit pelayanan kesehatan di bawah Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
2. Organisasi Profesi Kesehatan: Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan organisasi profesi kesehatan lainnya yang berperan dalam peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan.

3. Institusi Pendidikan Kesehatan: Perguruan tinggi dan institusi pendidikan lainnya yang menghasilkan tenaga kesehatan.
4. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bidang Kesehatan: Organisasi yang memiliki fokus pada isu-isu kesehatan masyarakat dan dapat menjadi mitra dalam pelaksanaan program kesehatan.
5. Sektor Lintas Program dan Lintas Sektor:
  - a. Pemerintah Daerah Kota Pontianak (Organisasi Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dll.).
  - b. Instansi Vertikal (Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Besar POM, dll.).
  - c. Pihak Swasta (klinik swasta, apotek, perusahaan, dll.) yang berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat.
6. Media Massa: Memiliki peran penting dalam penyebaran informasi kesehatan dan edukasi masyarakat.
7. Keluarga dan Komunitas: Lingkungan terdekat individu yang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku kesehatan.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil identifikasi masalah Dinas Kesehatan Kota Pontianak didapatkan masih belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan masih terdapatnya kematian ibu dan bayi yang seharusnya dapat dicegah dengan peningkatan layanan pada ibu hamil dan bayi baru lahir. Terdapat masalah gizi masyarakat yaitu masih terdapat kasus

stunting, wasting dan underweight di wilayah Kota Pontianak. Terkait sumber daya kesehatan yaitu tenaga kesehatan, sarana, prasarana, yang masih belum merata distribusinya. Masih ditemukannya kasus baru pada penyakit menular seperti Tuberculosis dan penyakit tidak menular seperti Diabetes Mellitus. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta permasalahan aksesabilitas terutama mengenai pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin. Beberapa masalah yang disebutkan diatas merupakan masalah kesehatan yang masih menjadi perhatian yang sangat penting oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Sehingga diperlukannya strategi dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut yang disusun pada Dokumen Renstra Th. 2025-2029 Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

#### 1. Kematian Ibu

Kasus Kematian Ibu di Kota Pontianak di Tahun 2024 sebanyak 13 (tiga belas) kasus, mengalami peningkatan dibanding Tahun 2023 sebanyak 10 (sepuluh) kasus. Berikut Grafik Trend Kasus Kematian Ibu pada lima (5) tahun terakhir, sebagai berikut:

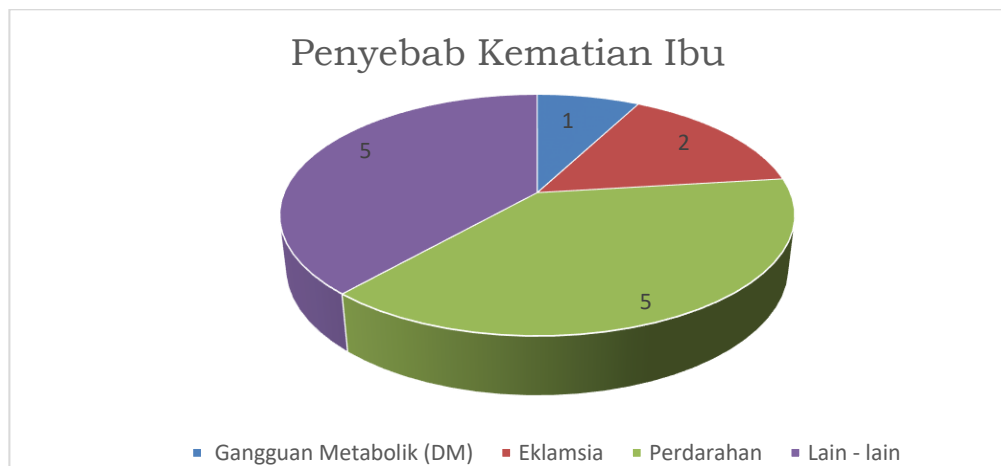
Gambar II.2  
Grafik Trend Kasus Kematian Ibu di Kota Pontianak  
Tahun 2020- 2024



Sumber : Sub Substansi KIA,, 2025

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa kematian ibu tahun 2024 terjadi peningkatan sebanyak 3 (tiga) kasus dibanding tahun 2023, dengan penyebab kematian adalah Eklampsia, Perdarahan, Gangguan Metabolik dan penyebab lain - lain, sehingga perlu adanya perhatian khusus dalam penanganannya agar dapat menekan angka kematian. Untuk kasus perdarahan itu sendiri dapat dilakukan untuk skrining awal saat kehamilan dengan melakukan ANC secara teratur serta pemeriksaan Laboratorium. Berikut Grafik penyebab kasus Kematian Ibu Tahun 2024, sebagai berikut :

Gambar II.3  
Grafik Penyebab Kasus Kematian Ibu di Kota Pontianak Tahun 2024



Sumber : Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, 2025

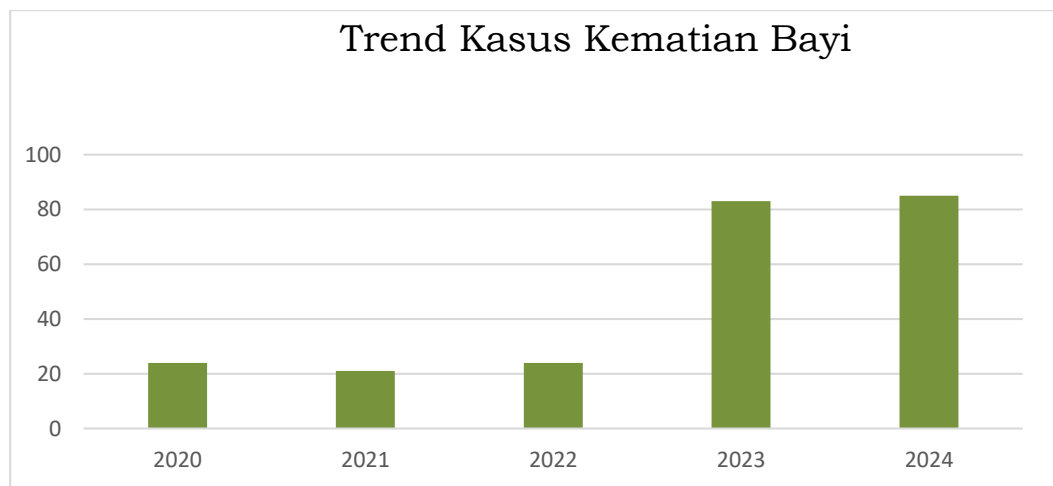
## 2. Kematian Bayi

Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi per 1.000 KH tahun 2023 data realisasi yang diperoleh lebih rendah dari target yang telah ditetapkan dan mengalami penurunan yang signifikan dibanding dengan capaian kinerja 3 (tiga) tahun sebelumnya, yaitu sebesar 28,08% dengan realisasi 7,94 per 1.000 KH dari target 2,23 per 1.000 KH. Di tahun 2024 trend kasus angka kematian bayi

semakin bertambah yaitu sebanyak 85 kasus dibandingkan kasus angka kematian bayi tahun 2023 sebanyak 83 kasus. Hal ini dipengaruhi oleh mekanisme pelaporan tentang jumlah kasus pelaporan jumlah kasus kematian bayi di Kota Pontianak terjadi perubahan di semua fasilitas pelayanan kesehatan.

Berikut Grafik trend Kasus Kematian bayi pada 5 (Lima) tahun terakhir, sebagaimana pada gambar di bawah ini:

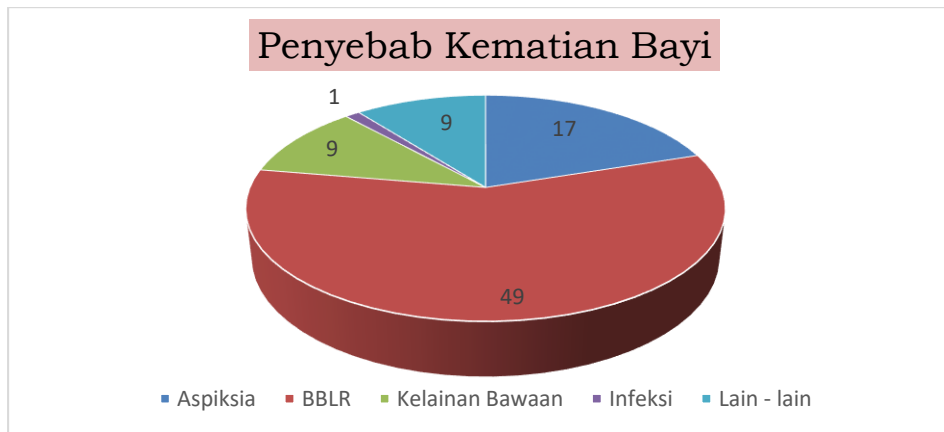
Gambar II.4  
Grafik Trend Kasus Kematian Bayi Kota Pontianak tahun 2020 – 2024



Sumber : Seksi KIA Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2025

Berdasarkan trend diatas tahun 2024 kematian bayi terbanyak disebabkan oleh Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah, Asfiksia, Kelainan Bawaan, Infeksi, dan lain-lain. Berikut Grafik penyebab kematian bayi sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar II.5  
Grafik Penyebab Kematian Bayi Kota Pontianak Tahun 2024



Sumber : Seksi KIA Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2025

Adapun alternatif solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak terkait penanggulangan Kematian Bayi adalah dengan melakukan beberapa kegiatan, sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran Jejaring Kesehatan Ibu dan Anak.
  2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA), Kualitas Pelayanan Bidan Praktek swasta dan Rumah Sakit.
  3. Pendekatan Keluarga untuk memantau Faktor Risiko
  4. Mengoptimalkan Kegiatan Audit Maternal Perinatal, sehingga mampu menganalisis penyebab Kematian Ibu, dan upaya pencegahan agar tidak terjadi kejadian serupa.
  5. Meningkatkan Skrining 4 Terlalu dan Penatalaksanaan 3 Terlambat.
  6. Mengoptimalkan SDM kesehatan terkait Kegawatdaruratan Kebidanan dalam 24 jam Disarana Faskes rujukan
3. Wasting pada Balita

Indikator Angka Wasting Balita Tahun 2024 realisasinya sebesar 2,83% (sumber e-PPGBM 2024), nilai realisasi ini berada di bawah target sebesar 7,00%. Indikator Berat Badan menurut Tinggi Badan (indikator BB/TB) merupakan indikator status gizi Balita yang menggambarkan proporsional tubuh dan menggambarkan masalah gizi akut sebagai akibat

keadaan yang tidak lama/singkat seperti wabah/kelaparan.

Berdasarkan hasil Survey PSG dari 29 kelurahan di kota Pontianak tahun 2024 dengan jumlah balita yang diukur sebanyak 21543 balita, terdapat 1407 balita dengan status Gizi Kurang. Perkembangan Angka Wasting Balita di Kota Pontianak dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar II.5  
Angka Wasting Balita Kota Pontianak tahun 2012 – 2024



Sumber : Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2025

Adapun sebaran Wasting perkelurahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.6  
Angka Wasting Balita Kota Pontianak Tahun 2024 Per Kelurahan

Desa/Kelurahan	JML DI UKUR	WASTING	% WASTING
Benua Melayu LautT	237	8,00	3,38
Benua Melayu Darat	337	14,00	4,15
Akcaya	374	13,00	3,48
Kota Baru	825	43,00	5,21

Parit Tokaya	235	17,00	7,23
Bangka Belitung Laut	656	23,00	3,51
Bansir Laut	319	14,00	4,39
Bangka Belitung Darat	494	2,00	0,40
Bansir Darat	598	9,00	1,51
Tanjung Hilir	554	8,00	1,44
Dalam Bugis	627	10,00	1,59
Saigon	386	32,00	8,29
Parit Mayor	501	11,00	2,20
Tanjung Hulu	581	7,00	1,20
Banjar Serasan	355	9,00	2,54
Tambelan Sampit	387	20,00	5,17
Sungai Jawi Luar	1343	28,00	2,08
Sungai Jawi Dalam	1830	19,00	1,04
Pal Lima	663	34,00	5,13
Sungai Beliung	1328	65,00	4,89
Sungai Bangkong	1704	34,00	2,00
Sungai Jawi	1955	51,00	2,61
Darat Sekip	210	5,00	2,38
Mariana	287	6,00	2,09
Tengah	218	2,00	0,92
Siantan Hilir	1169	43,00	3,68
Siantan Hulu	1110	65,00	5,86
Siantan Tengah	1022	2,00	0,20
Batulayang	1078	14,00	1,30
	21383	608,00	2,84

Sumber : Tim Kerja Gizi Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2025

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk dapat menurunkan Angka Wasting Balita di Kota Pontianak adalah;

1. Penguatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui Sosialisasi dan Koordinasi Lintas Sektor
2. Pendampingan ibu hamil risiko tinggi seperti ibu hamil dengan risiko 4T, kurang energi kronis, anemia, termasuk pemantauan pemanfaatan makanan tambahan pemulihan.

3. Pendampingan balita kurus, termasuk pemantauan pemanfaatan makanan tambahan pemulihan
4. Pemantauan tumbuh dan kembang anak di puskesmas dan posyandu
5. Pendidikan gizi bagi ibu hamil dan ibu balita melalui kelas ibu hamil dan kelas Pemberian Makanan bagi Bayi dan Anak
6. Perbaikan sarana sanitasi melalui program rumah tak layak huni
7. Perluasan cakupan sambungan rumah PDAM
8. Jaminan Kesehatan (PBI) bagi ibu hamil dan balita rentan masalah gizi dari keluarga kurang mampu
9. Pendampingan oleh kader Kadarzi/KGM/KP-ASI terhadap keluarga atau rumah tangga yang memiliki masalah gizi
10. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader tentang pencegahan masalah gizi
11. Bahan pangan untuk keluarga balita khususnya yang memiliki masalah gizi dan tidak mampu
12. Komitmen diantara tokoh masyarakat Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam rangka Penanggulangan Gizi Buruk.

#### 4. Underweight pada Balita

Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Angka underweight (BB/U) Balita Tahun 2024 sebesar 7,97%, target Kementerian Kesehatan untuk angka underweight (berat badan kurang) pada tahun 2024, yang didasarkan pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Status gizi berdasarkan indeks BB/U memperlihatkan indikasi masalah gizi secara umum dan tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang bersifat kronis atau pun akut. Adapun Angka Underweight Balita dihitung berdasarkan jumlah status gizi BB sangat kurang dan BB kurang (indikator BB/U). Berdasarkan hasil SKI di 29 Kelurahan Kota Pontianak tahun 2024 dengan jumlah balita yang ditimbang

sebanyak 21455 Balita, terdapat 1711 balita dengan status gizi berat badan kurang, atau sebesar 7,97%.

Perkembangan Angka Underweight Balita di Kota Pontianak dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

| Gambar II.8  
Trend Angka Underweight Balita Di Kota Pontianak Tahun 2013 – 2024



Sumber : Tim Kerja Gizi Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2025

Tabel II.9  
Sebaran Underweight Kota Pontianak Tahun 2024

KELURAHAN	JML DI UKUR	UNDERWEIGHT	%UNDERWEIGHT
Benua Melayu Laut	237	23	10,17
Benua Melayu Darat	337	101	12,22
Akcaya	374	33	10,12
Kota Baru	825	39	16,57
Parit Tokaya	235	30	8,05
Bangka Belitung Laut	656	43	6,55
Bansir Laut	319	26	8,31
Bangka Belitung Darat	494	8	1,61
Bansir Darat	598	17	3,03

Tanjung Hilir	554	34	6,15
Dalam Bugis	627	28	4,42
Saigon	386	97	21,83
Parit Mayor	501	68	13,46
Tanjung Hulu	581	89	15,32
Bansar Serasan	355	50	14,07
Tambelan Sampit	387	88	22,46
Sungai Jawi Luar	1343	25	1,83
Sungai Jawi Dalam	1830	63	3,44
Pal Lima	663	126	18,50
Sungai Beliung	1328	134	10,10
Sungai Bangkong	1704	93	5,41
Sungai Jawi	1955	139	7,07
Darat Sekip	210	20	9,29
Mariana	287	29	9,99
Tengah	218	15	6,72
Siantan Hilir	1169	80	6,84
Siantan Hulu	1110	178	15,73
Siantan Tengah	1022	2	0,20
Batulayang	1078	35	3,20
	21383	1711	7,97

Sumber : Tim Kerja Gizi Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2025

Apabila dilihat pada tabel di tingkat Kelurahan, angka *underweight* tertinggi terjadi di kelurahan Siantan Hulu, sedangkan yang terendah terjadi di Kelurahan Siantan Tengah.

Beberapa hal yang berkontribusi pada pencapaian ini antara lain:

1. Penguatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui Sosialisasi dan Koordinasi Lintas Sektor
2. Pendampingan ibu hamil risiko tinggi seperti ibu hamil dengan risiko 4T, kurang energi kronis, anemia, termasuk pemantauan pemanfaatan makanan tambahan pemulihan.
3. Pendampingan balita kurus, termasuk pemantauan pemanfaatan makanan tambahan pemulihan
4. Pemantauan tumbuh dan kembang anak di puskesmas dan posyandu

5. Pendidikan gizi bagi ibu hamil dan ibu balita melalui kelas ibu hamil dan kelas Pemberian Makanan bagi Bayi dan Anak
  6. Perbaikan sarana sanitasi melalui program rumah tak layak huni
  7. Perluasan cakupan sambungan rumah PDAM
  8. Jaminan Kesehatan (PBI) bagi ibu hamil dan balita rentan masalah gizi dari keluarga kurang mampu
  9. Pendampingan oleh kader Kadarzi/KGM/KP-ASI terhadap keluarga atau rumah tangga yang memiliki masalah gizi
  10. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader tentang pencegahan masalah gizi
  11. Bahan pangan untuk keluarga balita khususnya yang memiliki masalah gizi dan tidak mampu
  12. Balita Bawah Garis Merah apabila ditemukan di posyandu atau penemuan balita bermasalah gizi ketika berobat di Puskesmas, kedua nya segera ditindak lanjuti dengan penilaian status gizi, konseling dan pemberian Makanan Tambahan
  13. Adanya pemantauan oleh kader dan tenaga kesehatan terhadap balita yang teridentifikasi Bawah Garis Merah
  14. Di beberapa wilayah kerja puskesmas diterapkan kegiatan Pemberian Makan bagi Bayi dan Anak (PMBA) untuk keluarga yang memiliki balita, dan pelaksanaannya oleh kader serta dipantau oleh tenaga kesehatan.
5. Penyakit Menular

Menurut WHO (1990) ada 2 (dua) karakteristik penyakit yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Beberapa penyakit menular yang menjadi perhatian di Kota Pontianak, diantaranya penyakit Tuberculosis (TB), DBD, Malaria dan HIV/AIDS. Adapun penyakit Tuberculosis (TB) merupakan salah indikator utama yang menjadi sasaran dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan

mempersiapkan beberapa hal terkait penanganan Penyakit Menular dengan melalui 3 (tiga) standar teknis yang merupakan standar kualitas dari standar pelayanan minimal (SPM) yaitu: standar jumlah dan kualitas barang dan/ jasa, standar jumlah dan kualitas personal/ sumber daya manusia kesehatan, dan petunjuk teknis atau tatacara pemenuhan standar, serta melakukan beberapa upaya Promosi Kesehatan di masyarakat dengan menerapkan konsep Promosi Kesehatan, antara lain :

1. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS);
  3. Mengonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur;
  4. Tidak membuang sampah sembarangan;
  5. Melakukan kerja bakti untuk menciptakan lingkungan sehat;
  6. Menggunakan pelayanan kesehatan.
6. Penyakit Tidak Menular

Penyakit Tidak Menular, juga penyakit yang harus diperhatikan oleh Pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan sebagai Dinas terkait sangat memperhatikan beberapa Penyakit Tidak Menular tersebut. Diantaranya Penyakit Diabetes Melitus, Hipertensi, Stroke, Jantung, Kanker, Paru obstruktif kronis (PPOK) dan gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan. Adapun salah satu Indikator sasaran Dinas Kesehatan adalah penyakit Diabetes Melitus, permasalahan yang sering di temui pada kasus Penyakit Tidak Menular adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan dalam mendeteksi faktor resiko Penyakit Tidak Menular, faktor pencetus dari pola hidup yang tidak sehat yang terjadi disebagian masyarkat Kota Pontianak, masih lemahnya Surveilans Epidemiologi PTM, serta masih kurangnya dukungan dan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak yaitu dengan melakukan Peningkatan promotif dan preventif implementasi perilaku CERDIK sasaran promotif dan preventif PTM secara operasional, yang dilakukan pada beberapa tatanan (rumah tangga, tempat kerja, tempat sekolah, tempat umum, dll). Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah diet seimbang, merokok, aktivitas fisik dan kesehatan lainnya, melakukan deteksi dini PTM baik yang dilakukan di dalam gedung Puskesmas terintegrasi pelayanan PTM dalam paket pelayanan Puskesmas maupun pelayanan diluar gedung Puskesmas.

Selain itu Dinas Kesehatan juga mengembangkan aplikasi satu data di Puskesmas sehingga petugas tidak perlu lagi melakukan entry data pada dua aplikasi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan PTM, meningkatkan upaya penemuan penderita di Rumah sakit, Klinik dan Dokter Praktek Swasta dengan melakukan pendekatan serta bimbingan secara berkala, melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala ke Dinas Kesehatan dengan mengirimkan data pasien *by name by address*, memberdayakan masyarakat untuk ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang terkait dengan faktor risiko bersama penyebab Penyakit Tidak Menular.

#### 7. Aksesibilitas Layanan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 mensyaratkan bahwa Puskesmas harus didirikan di tiap Kecamatan, dalam kondisi tertentu dapat lebih dari satu Puskesmas berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas tentunya dengan memperhatikan persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium.

Untuk saat ini Kota Pontianak memiliki 23 Puskesmas di 29 Kelurahan juga memiliki 1(Satu) Unit Laboratorium Kesehatan,

1(Satu) Balai Kesehatan Mata Masyarakat. Kota Pontianak memiliki 14 Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun Swasta yang menjadi binaan Dinas Kesehatan Kota Pontianak diantaranya 13 Rumah Sakit sudah terakreditasi yang terdiri dari rumah sakit Type A, B, C dan D.

Permasalahan utama yang diidentifikasi merupakan kesenjangan antara capaian aktual dan kondisi ideal yang diharapkan, antara lain:

1. Angka kematian bayi (AKB) yang masih terjadi secara fluktuatif di beberapa wilayah kerja.
2. Penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi dan diabetes belum terdeteksi secara optimal.
3. Beban penyakit menular (TBC, HIV) masih tinggi dan menimbulkan beban ekonomi dan sosial.
4. Kualitas SDM kesehatan belum merata baik dari aspek jumlah maupun kompetensi.
5. Infrastruktur kesehatan, sarana, dan alat kesehatan belum sepenuhnya sesuai standar.
6. Ketergantungan pada pendanaan pusat dan provinsi, terutama dalam program prioritas nasional.
7. Pemanfaatan sistem informasi kesehatan belum optimal dan belum terintegrasi penuh.
8. Keterbatasan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat.

### 2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang daerah di masa mendatang. Isu Strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun dapat berpotensi menjadi

masalah daerah pada suatu saat. isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Berdasarkan permasalahan dan analisis akar permasalahan yang ada, berikut ini merupakan proses perumusan isu strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak, yang terdiri dari isu strategis global (internasional), nasional dan regional.

Tabel II.10  
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah

Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
		Global	Nasional	Regional	
Masih adanya kematian ibu dan kematian bayi	Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi	Target Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi secara global	Prioritas nasional stunting dan kesehatan ibu dan anak untuk membentuk generasi sehat dan berkualitas	Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan PHBS khususnya bersalin di Fasyankes sesuai standar	Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penguatan Puskesmas dan jejaringnya, serta pemberdayaan masyarakat melalui Posyandu dan kelas ibu hamil
Prevalensi angka stunting balita masih diatas angka nasional dan target RPJMD.	Penguatan program pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi	Komitmen global untuk mengakhiri segala bentuk malnutrisi	Percepatan penurunan stunting sebagai isu prioritas nasional	Keterbatasan pengetahuan gizi dan sanitasi di beberapa komunitas, serta masih ada keterbatasan akses pangan bergizi.	Kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan sumber daya lokal, dan intervensi gizi spesifik di tingkat kelurahan.

Masih adanya penyakit menular (seperti TBC) dan penyakit tidak menular (seperti hipertensi).	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular secara komprehensif	Ancaman penyakit menular dan beban ganda penyakit (ganda penyakit menular dan tidak menular) menjadi perhatian global.	Penguatan sistem surveilans dan respons penyakit menular serta kampanye hidup sehat.	Penyediaan obat yang masih kurang, kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan masih kurang, pencatatan pelaporan masih belum optimal baik faskes pemerintah maupun swasta, kurangnya upaya dari masyarakat terkait Germas dan PHBS.	Optimalisasi skrining penyakit di Puskesmas, dan edukasi masif tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Aksesibilitas layanan kesehatan terkait jaminan kesehatan yang belum optimal.	Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan yang berkeadilan melalui optimalisasi sistem jaminan kesehatan.	Prinsip Universal Health Coverage (UHC) untuk memastikan setiap orang mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan	Peningkatan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan ketersediaan fasilitas kesehatan	Adanya kendala dalam administrasi kependudukan dan pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan JKN. Adanya tantangan untuk mempertahankan UHC prioritas dengan tingkat keaktifan 80%.	Kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, dan lintas sektor terkait untuk sosialisasi program JKN, serta peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan milik pemerintah.
Upaya peningkatan mutu dan pelayanan serta siklus mutu belum	Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan yang	Daya saing terhadap mutu layanan RS dan Fasyankes	Adanya kebijakan pemerintah pusat terkait KRIS Kelas Rawat Inap	Keterbatasan pemenuhan sumber daya, khususnya SDM dan Anggaran	Upaya pembinaan monitoring dan evaluasi terhadap mutu layanan, serta

berjalan secara optimal.	berkelanjutan	luar negeri khususnya di wilayah yang berbatasan dengan Kalimantan perlu terus ditingkatkan.	Standar pada RS.	belum selaras dengan upaya pemenuhan kebutuhan standarisasi pemenuhan layanan.	optimalisasi penganggaran berdasarkan prioritas untuk memenuhi standarisasi layanan dan perubahan sistem layanan (ILP).
--------------------------	---------------	--	------------------	--	---

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Pontianak merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 2025-2029 yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025-2029, serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Adapun Tujuan Walikota Pontianak Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Pendidikan Yang Berdaya Saing.”

Adapun Indikator Tujuan (RPJMD) Walikota Pontianak Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

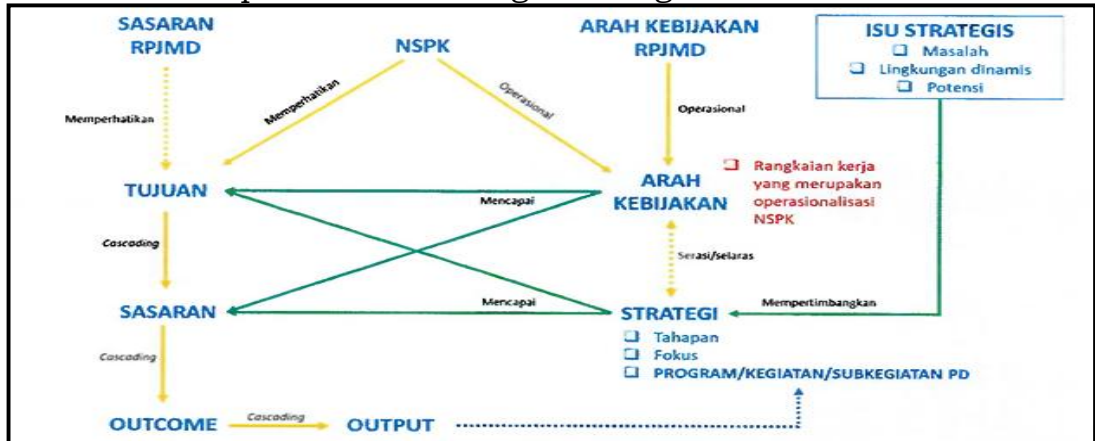
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM).”

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Pontianak berkaitan dengan Misi ke 1 Walikota Pontianak yaitu:

“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.”

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan disusun sesuai konsep Renstra PD dan kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan renstra sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagaimana gambar berikut

Gambar 3.1  
Konsep Rencana Strategis Perangkat Daerah



Gambar 3.1 di atas menunjukkan keterkaitan logis dan sistematis antara sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan nasional dan daerah, serta tahapan operasionalisasi yang dilakukan oleh perangkat daerah melalui strategi dan intervensi program.

Alur dimulai dari Sasaran RPJMD yang menjadi dasar penyusunan Tujuan dan Sasaran PD. Tujuan ini dibentuk dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah dan memperhatikan isu strategis, baik berupa permasalahan, potensi, maupun dinamika lingkungan yang berkembang di daerah. Proses ini menjamin bahwa setiap tujuan yang ditetapkan relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, tujuan tersebut diturunkan ke dalam strategi dan arah kebijakan PD. Penyusunan arah kebijakan dan strategi ini dilakukan secara selaras dengan arah kebijakan RPJMD dan tetap memperhatikan NSPK yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini, NSPK menjadi pedoman normatif dan operasional yang menjembatani konsistensi antara kebijakan pusat dan daerah.

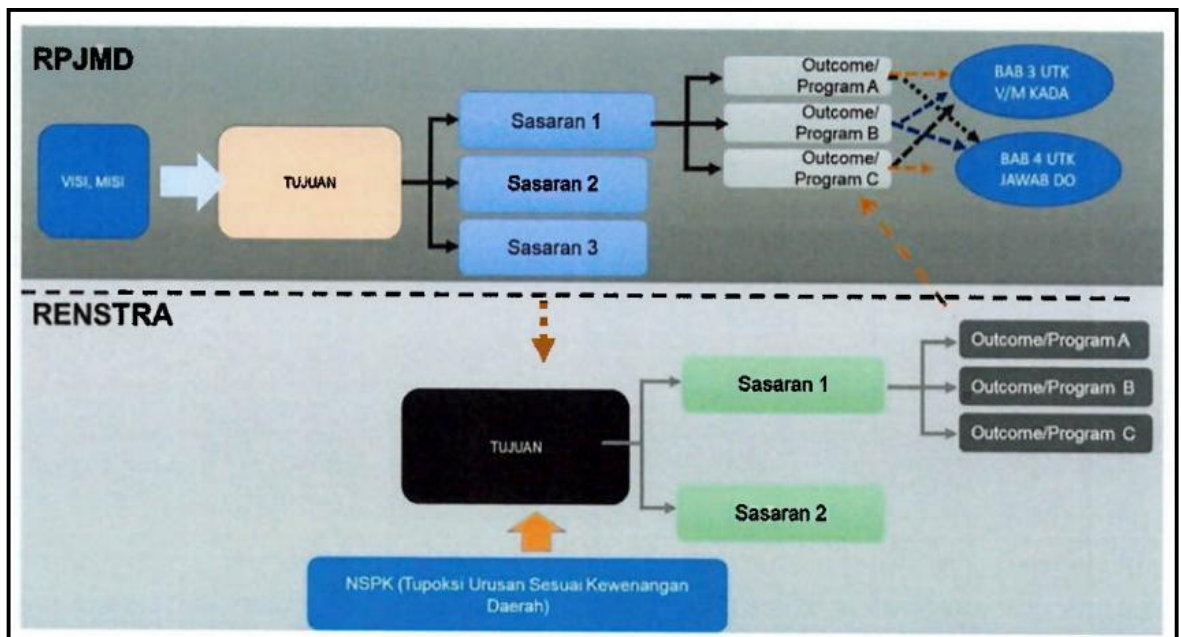
Setelah strategi ditetapkan, dilakukan perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai wujud konkret pelaksanaan strategi tersebut. Program, kegiatan dan subkegiatan ini disusun secara bertahap, fokus, dan terstruktur, dengan tetap mengikuti

nomenklatur resmi perencanaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap program harus mendukung pencapaian sasaran melalui *outcome* dan *output* yang telah ditetapkan.

Skema pada gambar 3.1 ini juga menegaskan bahwa keseluruhan proses perencanaan dalam Renstra PD bersifat *cascading*, artinya setiap level perencanaan harus menurunkan logika dan fokusnya secara berjenjang, mulai dari RPJMD hingga ke dokumen operasional seperti Renja PD. Hasil akhirnya adalah rangkaian kerja yang memperkuat akuntabilitas, integrasi antar dokumen perencanaan, serta efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat perangkat daerah.

Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



Kemudian pada Gambar 3.2 di atas digambarkan keterkaitan vertikal antara dokumen RPJMD dan dokumen Renstra masing-masing PD. Hubungan ini penting untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, dan program yang dirumuskan dalam Renstra PD selaras

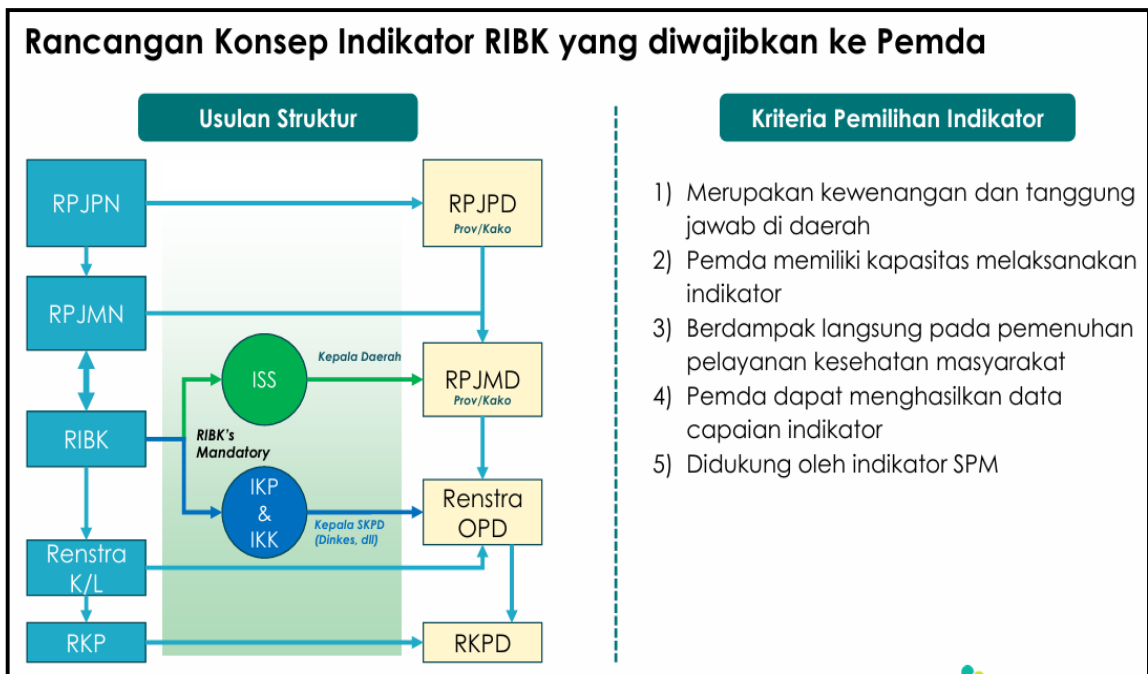
dan mendukung secara langsung pencapaian sasaran dalam RPJMD.

Penentuan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 didasarkan pada:

1. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Kementerian Kesehatan melalui Rencana Induk Bidang Kesehatan Tahun 2025-2029 dengan ketentuan:
  - a. Daerah diharuskan mencantumkan indikator RIBK di RPJMD dan Renstra PD sesuai gambar 3.2.
  - b. Akan dilakukan penilaian keselarasan indikator wajib oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas.
  - c. Hasil evaluasi indikator wajib tersebut akan dilaporkan kepada Presiden sebagaimana akan dicantumkan dalam Perpres RIBK 2025-2029.
2. Sasaran RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029

Gambar 3.3

Rancangan Konsep Indikator RIBK ke dalam Renstra Dinas Kesehatan



Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

### 3.1.1. Tujuan

Sebagai penjabaran Visi dan Misi RPJMD Kota Pontianak, maka tujuan yang ditetapkan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 adalah :

” Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”

Dengan Indikator tujuan Dinas Kesehatan Kota Potianak adalah:

1. Usia Harapan Hidup.
2. Prevalensi Stunting pada Balita

### 3.1.2. Sasaran

Sasaran adalah kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk tahun 2025–2029. adalah:

“Meningkatnya Mutu dan Akses Kesehatan Masyarakat.”

Adapun Indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota Pontianak sebagai berikut:

1. Jumlah Kematian Ibu
2. Jumlah Kematian Balita
3. Prevalensi Balita Wasting
4. Cakupan imunisasi bayi lengkap
5. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)
6. Angka keberhasilan pengobatan TB
7. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar
8. Fasyankes Pemerintah Terakreditasi

Berikut pernyataan Tujuan dan Sasaran dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak beserta Indikator Kinerjanya, disajikan pada Tabel.3.3, sebagai berikut:

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN											
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	75,46	75,83	76,20	76,57	76,94	77,31	77,68	
			Prevalensi Stunting Pada Balita (SSGI) (%)	22,3	21	19,6	18,2	16,8	15,4	14	
		Meningkatnya Mutu dan Akses Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	13	20	19	18	17	16	15	
			Jumlah Kematian Balita (Orang)	85	110	108	106	104	102	100	
			Prevalensi Balita Wasting (%)	8,2	8,2	7,9	7,7	7,5	7,2	7	
			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (%)	54,74	80	85	90	93	95	95	
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	89,61	98	98	98	98	98	98	
			Angka keberhasilan pengobatan TB (%)	89,7	90	90	90	90	90	90	
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	48,69	100	100	100	100	100	100	
Fasyankes Pemerintah Terakreditasi (%)	100	100	100	100	100	100	100				

## 3.2 STRATEGI

Strategi Organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Pontianak, strategi yang dilaksanakan adalah:

1. Penguatan pelayanan kesehatan berbasis standar dan inklusif di seluruh wilayah
2. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Kesehatan, termasuk redistribusi tenaga dan pelatihan teknis.
3. Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan, dan sistem informasi kesehatan melalui digitalisasi dan e-planning.
4. Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui pencegahan dan pengendalian penyakit serta tanggap kedaruratan.
5. Peningkatan kesehatan ibu anak, KB, kesehatan reproduksi, serta percepatan perbaikan gizi masyarakat.
6. Pembudayaan perilaku hidup sehat (PHBS) melalui *Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)*.

Penahapan Pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas Kesehatan Kota Pontianak dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4  
Penahapan Renstra Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025-2029

Tahapan	Tahap Konsolidasi (Tahun I - 2026)	Tahap Percepatan (Tahun II - 2027)	Tahap Pengembangan (Tahun III - 2028)	Tahap Pemantapan (Tahun IV - 2029)	Tahap Penguatan (Tahun V - 2030)
Tema Pembangunan:	Pemetaan kebutuhan dan penguatan kapasitas sumber daya kesehatan.	Implementasi program prioritas seperti penurunan stunting melalui peningkatan pelayanan gizi, pelayanan JKN serta pelayanan kesehatan dasar sesuai siklus hidup.	Evaluasi tengah periode dan penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi.	Penguatan sistem informasi kesehatan dan integrasi layanan	Mewujudkan Kota Pontianak Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan Sebagai Model Pembangunan Kota Ramah Lingkungan dan Humanis melalui pembangunan bidang kesehatan

### 3.3 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5  
Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Tahun	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Ket
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	2026	Melengkapi infrastruktur pelayanan kesehatan dasar serta kolaborasi peningkatan sumber daya manusia.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar.	
				2. Pemenuhan sarana dan prasarana di Puskesmas.	
				3. Pelatihan terpadu bagi tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) untuk meningkatkan kompetensi dasar.	
				4. Penguatan kerjasama dengan institusi pendidikan dan organisasi profesi kesehatan.	
		2027	Pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah serta peningkatan daya sumber daya manusia.	1. Pemerataan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan SDM Berdaya Saing.	
				2. Pembangunan atau rehabilitasi Puskesmas	
		2028	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang didukung kompetensi sumber daya manusia yang handal.	1. Peningkatan Kualitas dan Keterjangkauan Layanan Kesehatan.	
				2. Akreditasi Puskesmas secara berkala untuk menjamin standar mutu layanan.	
				3. Penerapan teknologi informasi	

			<p>untuk efisiensi dan akurasi data.</p> <p>4. Pelatihan lanjutan (spesialisasi) untuk SDM kesehatan agar lebih profesional dan handal.</p>
2029	Optimalisasi pemantapan pelayanan kesehatan dan daya saing sumber daya manusia	<p>1. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Daya Saing SDM.</p> <p>2. Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program kesehatan yang telah berjalan.</p> <p>3. Pengembangan sistem rujukan yang lebih terintegrasi antara Puskesmas dan rumah sakit.</p>	
2030	Optimalisasi penguatan pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul dan Berdaya Saing.	<p>1. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme.</p> <p>2. Pengembangan Karir dan Regenerasi</p> <p>3. Peningkatan kesejahteraan : Memastikan jam kerja yang wajar, lingkungan kerja yang aman dan nyaman, serta jaminan kesehatan yang memadai bagi seluruh pegawai.</p> <p>4. Rekrutmen Berbasis Kebutuhan: Melakukan rekrutmen SDM secara terencana dan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.</p>	

				<p>Prioritaskan penerimaan lulusan terbaik dari institusi pendidikan terkemuka untuk memastikan kualitas awal SDM.</p>
				<p>5. Akses ke Sumber Informasi Terkini: Memfasilitasi akses ke jurnal ilmiah, database medis untuk memastikan SDM kita selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. yang tinggi.</p>

Arah kebijakan merupakan ketentuan umum yang menjadi pedoman pelaksanaan strategi. Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Pontianak diarahkan untuk mendukung transformasi layanan kesehatan, memperkuat sistem, dan menjawab tantangan kesehatan masyarakat secara holistik.

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1 Uraian Program

Dengan mengacu pada tujuan, sasaran, dan strategi untuk mewujudkan sasaran dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, Dinas Kesehatan Kota Pontianak menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Adapun program, kegiatan, subkegiatan beserta Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 3406 Tahun 2024 Tentang Peubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dinas Kesehatan Kota Pontianak berkomitmen untuk mengintegrasikan dan melaksanakan Program Strategis Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025, serta senantiasa meningkatkan akuntabilitas dan kinerja melalui pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Pengawas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hal ini guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal dan merata bagi seluruh masyarakatdi Kota Pontianak. Penetapan program kegiatan dan subkegiatan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2025-2029 dalam menerapkan Program Strategis Nasional Kesehatan untuk semua, yang terdiri dari Stunting, Pemeriksaan Kesehatan

Gratis, Penetapan TBC dan Pembangunan RS lengkap dan berkualitas.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2025 – 2029 memuat 4 program wajib urusan kesehatan dan 1 program penunjang urusan pemerintahan. Berikut program – program dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rincian rancangan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tertuang dalam bab ini tidak hanya terbatas pada periode 2025-2029. Beberapa program dan kegiatan strategis telah dirancang dengan visi jangka panjang hingga tahun 2030. Secara khusus, program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2030 merupakan bagian integral dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Hasil dan evaluasi program tahun 2030 ini akan menjadi pijakan penting dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2030, agar dapat menjadi transisi untuk keberlanjutan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

#### 4.2 Uraian Kegiatan

Dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2025 – 2029 memuat 15 (lima belas) kegiatan urusan bidang kesehatan dan 9 (sembilan) kegiatan urusan penunjang. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

#### 4.2.1 Kegiatan urusan wajib bidang kesehatan:

- a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
- b. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara terintegrasi
- d. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- e. Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
- f. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- g. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- h. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, toko Obat, toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- i. Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

- j. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- k. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
- l. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
- m. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- n. Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- o. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

#### 4.2.2 Urusan Penunjang Pemerintah

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i. Peningkatan Pelayanan BLUD

Tabel 4.2 Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan RENSTRA Dinas Kesehatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN							
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH)		
					Prevalensi Stunting pada Balita		
		Meningkatnya Mutu dan Akses Kesehatan Masyarakat			Jumlah Kematian Ibu		
					Jumlah Kematian Balita		
					Prevalensi Balita Wasting		
					Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap		
					Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)		
					Angka keberhasilan pengobatan TB		
					Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
					Fasyankes Pemerintah Terakreditasi		

			Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.02.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1.02.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Terpenuhinya administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terkelolanya administrasi barang milik daerah dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada	

					Milik Daerah pada SKPD	Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.02.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.02.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terkelolanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

				Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1.02.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1.02.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1.02.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	

				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang Ditanggung Pemerintah Daerah	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

				Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus TB	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	

					DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Prevalensi Obesitas > 18 tahun	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
					Presentase lanjut usia yang mandiri	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Tersedianya fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

					rumah sakit		
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan	1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	

					Pemeliharaan Oleh Puskesmas		
					Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	
				Tersedianya Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPT yang memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
					Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	

				Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

				Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	

						Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	

						Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	

					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	

					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1.02.02.2.02.0024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis	

						Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1.02.02.2.02.0030 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	

					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.02.02.2.02.0037 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
					Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	

					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
					Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0049 - Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	
					Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1.02.02.2.02.0050 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
				Tercapainya FKTP dan FKRTL yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
				Terlaksananya Rekomendasi Perizinan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D	

					Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
			Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan		Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

				Tersedianya Berita acara dan rekomendasi yang dikeluarkan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
				Terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Praktek Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya	1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber	

					Manusia Kesehatan	Daya Manusia Kesehatan	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah/kabupaten/kota melalui bimbingan teknis, diklat maupun UKOM.	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dan minuman		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN	

						MAKANAN MINUMAN	
					Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Terlaksananya Pemberian Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengurus perizinan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
				Terlaksananya Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1	1.02.04.2.02 - Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu	

				Kesehatan 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	
					Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1.02.04.2.02.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	
				Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
				Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan	

				Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
				Terlaksananya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1.02.04.2.05 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
				Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	

					Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase Puskesmas dengan minimal 75 % Posyandu siklus hidup yang aktif	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Terlaksananya kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor dibidang kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
				Terlaksananya kegiatan sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	

				Terlaksananya Kegiatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

#### 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pembangunan daerah yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran pembangunan di bidang urusan pemerintahan daerah, termasuk urusan wajib pelayanan dasar kesehatan. IKD difokuskan pada hasil (outcome) atau dampak (impact) dari program/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah bidang kesehatan bukan hanya sebagai alat ukur kinerja Dinas Kesehatan, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan di Kota Pontianak.

##### 4.3.1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini memiliki outcome meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat dengan indikator program mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan, yang terdiri dari:

- a. Pelayanan kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- g. Pelayanan kesehatan PTM pada usia produktif
- h. Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis
- i. Fasyankes pemerintah yang memenuhi standar
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

- k. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)
- l. Persentase penyakit berpotensi KLB yang tertangani
- m. Persentase penyakit tropis terabaikan yang tertangani (Filariasis, Kusta, Frambusia, dll)
- n. Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
- o. Persentase anggaran Kepesertaan JKN yang ditanggung oleh pemerintah Kota Pontianak.

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu:

- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
  - Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota, memiliki beberapa Sub. Kegiatan, diantaranya :
  - 1) Subkegiatan Pembangunan Puskesmas.
  - 2) Subkegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya.
  - 3) Subkegiatan Pengembangan Puskesmas.
  - 4) Subkegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya.
  - 5) Subkegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan RS
  - 6) Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas.
  - 7) Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya.
  - 8) Subkegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
  - 9) Subkegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan alat kalibrasi

- 10) Subkegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. . .
  - 11) Subkegiatan Pengembangan Rumah Sakit
  - 12) Subkegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan.
  - 13) Subkegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
- b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan ini terdiri dari beberapa Sub Kegiatan, diantaranya:
- 1) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.
  - 2) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
  - 3) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
  - 4) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
  - 5) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
  - 6) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
  - 7) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
  - 8) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
  - 9) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus

- 10) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
- 11) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- 12) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
- 13) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
- 14) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
- 15) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 16) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 17) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 18) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 19) Subkegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- 20) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
- 21) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA.
- 22) Subkegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
- 23) Subkegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 24) Subkegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 25) Subkegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah

- 26) Subkegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Pontensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
- 27) Subkegiatan Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat
- 28) Subkegiatan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 29) Subkegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit
- 30) Subkegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas
- 31) Subkegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya
- 32) Subkegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- 33) Subkegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Paca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)
- 34) Subkegiatan Penyediaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
- 35) Subkegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- 36) Subkegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
- 37) Subkegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
- 38) Subkegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
- 39) Subkegiatan Pengelolaan Kawasan tanpa Rokok
- 40) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
- 41) Subkegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
- 42) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
- 43) Subkegiatan Pengelolaan Layanan Imunisasi

44) Subkegiatan Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik

45) Subkegiatan Pengeloalan Pelayanan Kesehatan Haji

c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara terintegrasi

Kegiatan ini terdiri Subkegiatan:

1) Subkegiatan Peneglolaan Sistem Informasi Kesehatan

d. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan:

1) Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya.

2) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3) Peningkatan Mutu pelayanan Fasilitas Kesehatan

4) Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanana Kesehatan Rujukan

4.3.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini memiliki outcome meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan dengan indikator ratio Dokter, Perawat, dan Bidan. Berikut kegiatan dan subkegiatan dari program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.

a. Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

1) Subkegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

- b. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
  - 1) Subkegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - 2) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
  - 3) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- c. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Subkegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

#### 4.3.3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Outcome dari program ini adalah meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dan minuman, dengan indikator persentase fasilitas kesehatan, farmasi, industri pangan rumah tangga, TPM (Tempat Pengolahan Makanan), dan TTU (Tempat-tempat Umum) sesuai standar. Dapat dihitung melalui Persentase TPP memenuhi syarat pengolahan pangan meliputi hasil IKL (Inspeksi Kesehatan Lingkungan) peningkatan penjamah pangan dan pemeriksaan pangan dan persentase TFU prioritas meliputi sekolah, pasar, terminal, pelabuhan, bandara dan akomodasi yang memenuhi syarat IKL dan pemeriksaan/Uji Kualitas Lingkungan,  $(\text{Jlh TFU MS} / \text{Jml Target TFU dalam 1 Tahun} \times 100\%)$ .

Adapun kegiatan dan subkegiatan pada program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, toko Obat, toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
  - 1) Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- b. Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
  - 1) Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- c. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
  - 1) Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- d. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

- 1) Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
- e. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
  - 1) Subkegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

#### 4.3.4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

*Outcome* program ini adalah meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dengan indikator persentase puskesmas dengan minimal 75 % posyandu siklus hidup yang aktif. Adapun kegiatan dan subkegiatan pada program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
  - 1) Subkegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - 2) Subkegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- b. Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Subkegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Subkegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Penegmbanagn dan Pelaksanaan Upata Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

4.3.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

3) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

4) Subkegiatan koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5) Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

6) Subkegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

7) Subkegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

8) Subkegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

9) Subkegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

10) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 3) Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - 4) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 5) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 1) Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - 2) Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - 3) Subkegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 4) Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 5) Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 6) Subkegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1) Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - 2) Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - 3) Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  - 4) Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 5) Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 4) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 5) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 6) Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 7) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3) Subkegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
  - 4) Subkegiatan Pengadaan Mebel
  - 5) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 6) Subkegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
  - 7) Subkegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
  - 8) Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 9) Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 10) Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3) Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 4) Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
  - 5) Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
  - 6) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 7) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 8) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- i. Peningkatan Pelayanan BLUD

1) Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  
BLUD

Berikut Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja serta Pendanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN  
DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				480.589.153.973		509.066.316.222		516.319.395.315		522.741.230.834		528.555.913.378		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				333.448.542.007		346.274.444.940		350.904.463.748		362.421.776.277		365.608.942.786		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	96,25	100	333.448.542.007	100	346.274.444.940	100	350.904.463.748	100	362.421.776.277	100	365.608.942.786	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				423.554.411		539.413.721		572.502.802		594.973.262		627.021.846		
Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	7	423.554.411	7	539.413.721	7	572.502.802	7	594.973.262	7	627.021.846		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	6		6				6		6			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	30	5		5		5		5		5			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata	0	1		1		1		1		1			

	Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)												
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	10		10		10		10		10		
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				215.000.000		198.253.956		218.079.352		239.887.287		251.881.652	
Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	7	215.000.000	7	198.253.956	7	218.079.352	7	239.887.287	7	251.881.652	
1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10.770.150		17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.770.150	1	17.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000	
1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		20.000.000		20.000.000		20.000.000		12.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	12.000.000	
1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan				0		11.847.165		10.770.150		11.500.000		11.500.000	

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	10	0	10	11.847.165	10	10.770.150	10	11.500.000	10	11.500.000	
1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				197.784.261		201.062.600		211.115.800		221.671.600		232.755.100	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	30	5	197.784.261	5	201.062.600	5	211.115.800	5	221.671.600	5	232.755.100	
1.02.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0		20.000.000		21.000.000		22.050.000		23.152.500	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	0	1	20.000.000	1	21.000.000	1	22.050.000	1	23.152.500	
1.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0		15.750.000		16.537.500		17.364.375		18.232.594	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	0	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.375	1	18.232.594	
1.02.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		25.000.000		27.500.000		15.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1	0	1	25.000.000	1	27.500.000	1	15.000.000	1	30.000.000	
1.02.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen				0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	

Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	6	0	6	30.000.000		30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000		
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				181.447.635.982		181.816.759.812		179.502.418.223		179.322.904.042		178.668.165.320,99		
Terpenuhinya administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	48	181.447.635.982	48	181.816.759.812	48	179.502.418.223	48	179.322.904.042	48	178.668.165.320,99		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	36	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	5		5		5		5		5			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.267	1.460		1.480		1.500		1.500		1.500			
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				179.158.486.185		179.295.171.577		177.353.655.577		176.958.147.577		176.494.482.577		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.267	1.460	179.158.486.185	1.480	179.295.171.577	1.500	177.353.655.577	1.500	176.958.147.577	1.500	176.494.482.577		
1.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.066.160.000		2.277.880.000		1.904.300.052		2.119.501.794		1.927.596.391,99		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	36	12	2.066.160.000	12	2.277.880.000	12	1.904.300.052	12	2.119.501.794	12	1.927.596.391,99		

1.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				208.621.047		208.621.047		208.621.047		208.621.047		208.621.047	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4	4	208.621.047	4	208.621.047	4	208.621.047	4	208.621.047	4	208.621.047	
1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				14.368.750		15.087.188		15.841.547		16.633.624		17.465.305	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	5	14.368.750	5	15.087.188	5	15.841.547	5	16.633.624	5	17.465.305	
1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	48	0	48	20.000.000	48	20.000.000	48	20.000.000	48	20.000.000	
1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.000.000		171.565.000		173.968.750		176.492.689		179.142.823	
Terkelolanya administrasi barang milik daerah dengan baik	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3	3	10.000.000	3	171.565.000	3	173.968.750	3	176.492.689	3	179.142.823	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	10	10		10		10		10		10		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang	3	3		3		3		3		3		

	Milik Daerah pada SKPD (Laporan)												
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
1.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		5.000.000		5.250.000		5.512.500		5.788.125	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	0	1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.512.500	1	5.788.125	
1.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		10.000.000		10.500.000		11.025.000		11.576.250	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	0	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.576.250	
1.02.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000		123.490.000		123.490.000		123.490.000		123.490.000	
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3	3	10.000.000	3	123.490.000	3	123.490.000	3	123.490.000	3	123.490.000	
1.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		11.025.000		11.576.250		12.155.063		12.762.816	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3	3	0	3	11.025.000	3	11.576.250	3	12.155.063	3	12.762.816	
1.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		11.025.000		11.576.250		12.155.063		12.762.816	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	10	10	0	10	11.025.000	10	11.576.250	10	12.155.063	10	12.762.816	
1.02.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0		11.025.000		11.576.250		12.155.063		12.762.816	

Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	0	1	11.025.000	1	11.576.250	1	12.155.063	1	12.762.816		
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				397.003.165		475.283.597		429.705.519		454.757.521		582.767.175		
Terkelolanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	10	397.003.165	11	475.283.597	12	429.705.519	14	454.757.521	15	582.767.175		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	-	18		18		18		18		18			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	60		60		60		60		60			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
1.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				280.729.655		153.510.000		161.185.500		161.185.500		177.707.014		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	2	280.729.655	2	153.510.000	2	161.185.500	2	161.185.500	2	177.707.014		
1.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	-	18	0	18	20.000.000	18	22.000.000	18	24.200.000	18	26.620.000		
1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				71.843.750		79.028.125		3.000.000		3.000.000		86.930.938		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4	71.843.750	4	79.028.125	4	3.000.000	4	3.000.000	4	86.930.938		
1.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				44.429.760		207.745.472		228.520.019		251.372.021		276.509.223		

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	10	44.429.760	11	207.745.472	12	228.520.019	14	251.372.021	15	276.509.223		
1.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	60	0	60	15.000.000	60	15.000.000	60	15.000.000	60	15.000.000		
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.218.958.02 2		1.327.063.937		1.459.770.332		1.605.747.365		1.766.322.0 99		
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	1.218.958.02 2	4	1.327.063.937	4	1.459.770.332	4	1.605.747.365	4	1.766.322.0 99		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	11		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	25		27		30		33		37			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	24	12		12		12		12		12			
1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				137.898.871		137.898.871		151.688.758		166.857.634		183.543.397		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	137.898.871	1	137.898.871	1	151.688.758	1	166.857.634	1	183.543.397		
1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				208.582.772		229.441.049		252.385.154		277.623.670		305.386.036		

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	208.582.772	4	229.441.049	4	252.385.154	4	277.623.670	4	305.386.036		
1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				48.386.636		53.225.300		58.547.830		64.402.613		70.842.874		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	48.386.636	4	53.225.300	4	58.547.830	4	64.402.613	4	70.842.874		
1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				298.158.460		327.974.306		360.771.737		396.848.910		436.533.801		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	298.158.460	4	327.974.306	4	360.771.737	4	396.848.910	4	436.533.801		
1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				146.323.352		160.955.687		177.051.256		194.756.382		214.232.020		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	11	146.323.352	4	160.955.687	4	177.051.256	4	194.756.382	4	214.232.020		
1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.528.900		2.781.790		3.059.969		3.365.966		3.702.562		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	24	12	2.528.900	12	2.781.790	12	3.059.969	12	3.365.966	12	3.702.562		
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				377.079.031		414.786.934		456.265.628		501.892.190		552.081.409		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	25	377.079.031	27	414.786.934	30	456.265.628	33	501.892.190	37	552.081.409		
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				977.401.269		4.437.665.038		3.793.828.387		3.615.983.864		4.075.356.243		
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		60	977.401.269	38	4.437.665.038	42	3.793.828.387	44	3.615.983.864	49	4.075.356.243		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau				1		1		1		1			

	Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)												
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	0		0		1		1		1		
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)						1		1		1		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	35		18		19		20		22		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		0		0		0		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	1		1		0		0		0		
1.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				350.000.000		450.000.000		0		0		0	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	350.000.000	1	450.000.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				342.000.000		425.000.000		0		0		0	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	1	342.000.000	1	425.000.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				46.743.451		51.417.796		56.559.576		59.387.554		65.326.310	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	35	46.743.451	18	51.417.796	19	56.559.576	20	59.387.554	22	65.326.310	
1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				238.657.818		262.523.600		288.775.960		303.214.758		333.536.234	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		60	238.657.818	38	262.523.600	42	288.775.960	44	303.214.758	49	333.536.234	
1.02.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		100.000.000		105.000.000		115.500.000	

Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	0	0	0	0	1	100.000.000	1	105.000.000	1	115.500.000		
1.02.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		50.000.000		55.000.000		60.500.000		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)			0		0	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000		
1.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		2.948.723.642		3.248.492.851		3.043.381.552		3.445.493.699		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	0	1	2.948.723.642	1	3.248.492.851	1	3.043.381.552	1	3.445.493.699		
1.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		300.000.000		50.000.000		50.000.000		55.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0	1	300.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000		
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.777.503.337		2.820.955.435		2.904.797.115		2.365.078.205,59		3.389.120.001,01		
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.777.503.337	12	2.820.955.435	12	2.904.797.115	12	2.365.078.205,59	12	3.389.120.001,01		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	0		2		2		2		2			

1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		2.500.001,05		2.499.999		2.499.999,59		2.500.001,01		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	12	0	12	2.500.001,05	12	2.499.999	12	2.499.999,59	12	2.500.001,01		
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				679.253.628		798.455.433,95		880.297.116		838.378.206		860.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	679.253.628	12	798.455.433,95	12	880.297.116	12	838.378.206	12	860.000.000		
1.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	0	0	2	20.000.000	2	22.000.000	2	24.200.000	2	26.620.000		
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.098.249.709		2.000.000.000		2.000.000.000		1.500.000.000		2.500.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.098.249.709	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	12	1.500.000.000	12	2.500.000.000		
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				512.117.633		1.281.246.111		1.444.362.172		1.001.714.567,41		1.108.354.413		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	36	40	512.117.633	31	1.281.246.111	31	1.444.362.172	31	1.001.714.567,41	31	1.108.354.413		
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	0		0		0		0		0			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	4		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	40		29		29		29		29			

	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	150	133		144		151		159		167		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0		1		1		1		1		
1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				372.244.046		568.146.000		412.610.000		412.610.000		412.610.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	36	40	372.244.046	31	568.146.000	31	412.610.000	31	412.610.000	31	412.610.000	
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				121.600.000		147.320.000		147.320.000		147.320.000		147.320.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	40	121.600.000	29	147.320.000	29	147.320.000	29	147.320.000	29	147.320.000	
1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		92.323.000		96.939.150		101.786.108		106.875.413	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	150	133	0	144	92.323.000	151	96.939.150	159	101.786.108	167	106.875.413	
1.02.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.02.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				4.945.172		69.718.000		163.380.000		163.380.000		171.549.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	1	4.945.172	1	69.718.000	1	163.380.000	1	163.380.000	1	171.549.000	

1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				13.328.415		200.000.000		400.000.000		106.618.459,4 1		200.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	4	13.328.415	1	200.000.000	1	400.000.000	1	106.618.459,4 1	1	200.000.000		
1.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		203.739.111		224.113.022		70.000.000		70.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0	1	203.739.111	1	224.113.022	1	70.000.000	1	70.000.000		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				145.684.368. 188		153.404.492.2 89		160.623.110.44 8		173.284.124.7 61		175.212.692 .865		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	27	27	145.684.368. 188	27	153.404.492.2 89	27	160.623.110.44 8	27	173.284.124.7 61	27	175.212.692 .865		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				145.684.368. 188		153.404.492.2 89		160.623.110.44 8		173.284.124.7 61		175.212.692 .865		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	27	27	145.684.368. 188	27	153.404.492.2 89	27	160.623.110.44 8	27	173.284.124.7 61	27	175.212.692 .865		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				144.659.082. 403		160.583.811.2 03		163.070.587.42 0		157.964.637.3 30		160.618.557 .198		
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1,4	1,4	144.659.082. 403	1,4	160.583.811.2 03	1,4	163.070.587.42 0	1,4	157.964.637.3 30	1,4	160.618.557 .198	1.02.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS KESEHATAN	
	Persentase Hipertensi dalam Pengendalian (%)	18,9	25		30		35		40		40			
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang Ditanggung Pemerintah Daerah (%)	12,84	21		21		21		21		21			

	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	-	6,9	6,9	10,34	13,79	20,69						
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	80	80	80	85	85						
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	48	80	80	80	80	80						
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100	100	100	100						
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	81,84	81,84	81,84	88,9	88,9	88,9						
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100						
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	0	12	11,5	11	10	10						
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	90	90	90	90	90	90						
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	26,62	25	25	23	23	23						
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	74,3	77	79	81	83	83						
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				45.215.589.685	59.079.313.571	57.723.888.485,65	51.807.733.803,78			50.416.650.498,07			
Tersedianya fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	0	33.858.704.000	0	49.244.945.696	0	43.761.132.618	0	43.631.745.345	0	21.933.413.994	
	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	3	4		3		2		2		0		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	6	23		23		23		23		23		
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	0	2		0		0		0		1		

	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	6	0		2		2		2		1		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	2	2		2		2		2		2		
1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas				27.758.704.00		45.498.466.362		39.005.005.350		39.015.005.350		0	
Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	3	4	27.758.704.00	3	45.498.466.362	2	39.005.005.350	2	39.015.005.350	0	0	
1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				50.000.000		0		0		0		15.000.000.000	
Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	0	2	50.000.000	0	0	0	0	0	0	1	15.000.000.000	
1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas				0		0		0		0		0	
Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				500.000.000		0		0		0		0	
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan	2	2	500.000.000	2	0	2	0	2	0	2	0	

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)												
1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				50.000.000			0		500.000.000			0	1.500.000.000
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	6	23	50.000.000	23		0	23	500.000.000	23		0	1.500.000.000
1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0			0		0			0	0
Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	6	0	0	2		0	2	0	2		0	0
1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit				5.500.000.000			3.746.479.334		4.256.127.268			4.616.739.995	5.433.413.994
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	2	2	5.500.000.000	2		3.746.479.334	2	4.256.127.268	2		4.616.739.995	5.433.413.994
Tersedianya Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPT yang memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	23	24	11.356.885.685	24		9.834.367.875	24	13.962.755.867,65	24		8.175.988.458,78	28.483.236.504,07
	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	46	69		69			69		69			

	Regional/Regional Maintainance Center (Unit)												
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	3	2		3		3		3		3		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	23	23		23		23		23		23		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	5	90		90		90		90		90		
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				5.702.191.77 5		5.173.852.198		7.316.856.661		4.566.490.700		19.995.787. 472	
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	5	90	5.702.191.77 5	90	5.173.852.198	90	7.316.856.661	90	4.566.490.700	90	19.995.787. 472	
1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				19.815.363		150.000.000		150.000.000		125.000.000		150.000.000	
Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	46	69	19.815.363	69	150.000.000	69	150.000.000	69	125.000.000	69	150.000.000	
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				26.349.349		110.000.000		110.000.000		85.000.000		110.000.000	
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	23	23	26.349.349	23	110.000.000	23	110.000.000	23	85.000.000	23	110.000.000	

1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				5.592.429.215		4.400.515.677		6.385.899.206,65		3.399.497.758,78		8.227.449.032,07		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	3	2	5.592.429.215	3	4.400.515.677	3	6.385.899.206,65	3	3.399.497.758,78	3	8.227.449.032,07		
1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				16.099.983		0		0		0		0		
Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	23	24	16.099.983	24	0	24	0	24	0	24	0		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				99.144.693.807		100.995.454.534		104.798.751.527,35		105.540.961.378,22		109.524.370.336,93		
Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	12	12	99.144.693.807	12	100.995.454.534	12	104.798.751.527,35	12	105.540.961.378,22	12	109.524.370.336,93		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			

	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	2	12		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	2	12		24		24		24		24			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	23	23		23		23		23		23			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	27	27		27		27		27		27			
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	0	1		1		1		1		1			

	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.773	12.099		12.704		13.339		14.006		14.707			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	11.035	12.160		12.768		13.406		14.077		14.781			
	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	92	95		95		95		95		95			
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	160.529	91.480		121.974		152.467		182.960		182.960			
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	2,375	1,903		1,636		1,446		1,301		1,189			
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	15,633	16.228		16.569		17.017		17.543		20.813			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	11,95	10,274		8,836		7,808		7,026		6,421			
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	7,075	6,588		6,588		6,588		6,588		6,588			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.168	1.465		1.476		1.487		1.498		1.498			
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	11.682	17.567		17.743		17.920		18.099		18.099			
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	82.453	52.169		52.691		53.218		53.750		53.750			

	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	54.670	80.478		84.502		88.727		93.164		97.822			
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	251,742	447,493		469,868		493,361		518,029		543,931			
	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)													
	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	357	2.651		2.651		2.651		2.651		2.651			
	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	97.459	103.784		108.973		114.422		120.143		126.150			
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	32.637	45.482		47.756		50.144		52.651		55.283			
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.496	11.425		11.996		12.596		13.226		13.887			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	24	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12	24		24		24		24		24			

	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	23	23		23		23		23		23			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				1.404.616.035		1.545.077.639		1.699.585.402		1.536.772.360		1.690.449.596		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	11.035	12.160	1.404.616.035	12.768	1.545.077.639	13.406	1.699.585.402	14.077	1.536.772.360	14.781	1.690.449.596		
1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				53.266.825		58.593.508		271.923.300		299.115.630		329.027.193		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.773	12.099	53.266.825	12.704	58.593.508	13.339	271.923.300	14.006	299.115.630	14.707	329.027.193		
1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				105.034.201		115.537.621		536.192.019		589.811.221		648.792.343		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.496	11.425	105.034.201	11.996	115.537.621	12.596	536.192.019	13.226	589.811.221	13.887	648.792.343		
1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				29.405.113		32.345.624		150.110.979		165.122.076		181.634.284		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	32.637	45.482	29.405.113	47.756	32.345.624	50.144	150.110.979	52.651	165.122.076	55.283	181.634.284		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				993.255.052		1.092.580.557		1.003.380.300		1.054.663.462		1.062.134.808		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	97.459	103.784	993.255.052	108.973	1.092.580.557	114.422	1.003.380.300	120.143	1.054.663.462	126.150	1.062.134.808		

1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				18.602.976		356.267.380		374.080.749		392.784.787		412.424.026		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	251,742	447,493	18.602.976	469,868	356.267.380	493,361	374.080.749	518,029	392.784.787	543,931	412.424.026		
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				235.739.508		256.313.459		106.957.637		117.953.400		130.048.741		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	54.670	80.478	235.739.508	84.502	256.313.459	88.727	106.957.637	93.164	117.953.400	97.822	130.048.741		
1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				21.862.082		24.048.290		21.279.231		22.343.193		23.460.352		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	82.453	52.169	21.862.082	52.691	24.048.290	53.218	21.279.231	53.750	22.343.193	53.750	23.460.352		
1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				4.226.878		7.397.775		7.767.664		8.156.047		8.563.849		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	11.682	17.567	4.226.878	17.743	7.397.775	17.920	7.767.664	18.099	8.156.047	18.099	8.563.849		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				296.625.100		508.687.610		470.698.000		471.328.000		471.989.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.168	1.465	296.625.100	1.476	508.687.610	1.487	470.698.000	1.498	471.328.000	1.498	471.989.000		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				666.730.000		1.373.900.000		1.373.900.000		1.373.900.000		1.373.900.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	11,95	10,274	666.730.000	8,836	1.373.900.000	7,808	1.373.900.000	7,026	1.373.900.000	6,421	1.373.900.000		

1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				400.000.000		400.000.000		440.000.000		532.400.000		585.640.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	15,633	16.228	400.000.000	16.56 9	400.000.000	17.017	440.000.000	17.543	532.400.000	20.813	585.640.000		
1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				580.200.000		210.716.000		210.716.000		210.716.000		210.716.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	12	12	580.200.000	12	210.716.000	12	210.716.000	12	210.716.000	12	210.716.000		
1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				504.706.303		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	12	12	504.706.303	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6.652.825.34 0		6.985.466.607		7.334.739.937, 35		7.701.476.934 ,22		8.086.550.7 80,93		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12	12	6.652.825.34 0	12	6.985.466.607	12	7.334.739.937, 35	12	7.701.476.934 ,22	12	8.086.550.7 80,93		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				176.829.948		194.512.943		158.972.010		166.920.611		175.266.641		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	12	12	176.829.948	12	194.512.943	12	158.972.010	12	166.920.611	12	175.266.641		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				153.612.555		743.173.811		727.812.555		743.173.811		743.173.811		

Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12	12	153.612.555	12	743.173.811	12	727.812.555	12	743.173.811	12	743.173.811		
1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				346.971.797		458.362.280		481.280.395		505.344.415		530.611.635		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	12	346.971.797	12	458.362.280	12	481.280.395	12	505.344.415	12	530.611.635		
1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				0		0		0		0		0		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				768.957.561		871.384.717		871.384.717		871.384.717		871.384.717		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12	12	768.957.561	12	871.384.717	12	871.384.717	12	871.384.717	12	871.384.717		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				416.431.834		13.699.778		15.754.745		18.117.957		20.835.651		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	160.529	91.480	416.431.834	121.974	13.699.778	152.467	15.754.745	182.960	18.117.957	182.960	20.835.651		
1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)			0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				3.111.930.000		3.111.930.000		3.111.930.000		3.111.930.000		3.111.930.000		

Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	12	12	3.111.930.000	12	3.111.930.000	12	3.111.930.000	12	3.111.930.000	12	3.111.930.000		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1.483.177.775		2.102.756.950		2.062.913.597		2.158.929.262		2.264.546.493		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12	24	1.483.177.775	24	2.102.756.950	24	2.062.913.597	24	2.158.929.262	24	2.264.546.493		
1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				65.264.275.600		65.916.918.356		66.576.087.540		67.241.848.415		67.914.266.899		
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	12	65.264.275.600	12	65.916.918.356	12	66.576.087.540	12	67.241.848.415	12	67.914.266.899		
1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				191.560.000		210.716.000		210.716.000		210.716.000		210.716.000		
Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	357	2.651	191.560.000	2.651	210.716.000	2.651	210.716.000	2.651	210.716.000	2.651	210.716.000		
1.02.02.2.02.0030 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				13.486.832		14.835.515		16.319.067		17.950.973		19.746.071		
Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	0	1	13.486.832	1	14.835.515	1	16.319.067	1	17.950.973	1	19.746.071		
1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				3.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	2	2	3.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				8.962.296.050		9.978.844.726		10.623.442.720		11.332.500.513		12.112.464.084		

Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	23	23	8.962.296.050	23	9.978.844.726	23	10.623.442.720	23	11.332.500.513	23	12.112.464.084		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				299.127.000		170.934.000		170.934.000		170.934.000		1.709.340.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	2	12	299.127.000	24	170.934.000	24	170.934.000	24	170.934.000	24	1.709.340.000		
1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				59.882.008		0		1.350.000.000		0		0		
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	27	27	59.882.008	27	0	27	1.350.000.000	27	0	27	0		
1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0		
1.02.02.2.02.0037 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				175.314.311		192.845.742		212.130.316		233.343.348		256.677.683		
Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	24	12	175.314.311	12	192.845.742	12	212.130.316	12	233.343.348	12	256.677.683		
1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				0		500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		
Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	1	0	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000		
1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan				400.000.000		450.000.000		547.580.934		557.339.027		568.072.930		

kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	2,375	1,903	400.000.000	1,636	450.000.000	1,446	547.580.934	1,301	557.339.027	1,189	568.072.930	
1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				212.861.277		97.153.340		106.024.334		115.782.427		127.360.670	
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	92	95	212.861.277	95	97.153.340	95	106.024.334	95	115.782.427	95	127.360.670	
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				56.141.470		2.437.160		2.680.876		2.984.964		3.243.860	
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	7,075	6,588	56.141.470	6,588	2.437.160	6,588	2.680.876	6,588	2.984.964	6,588	3.243.860	
1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok				12.000.000		8.787.146		9.226.503		9.687.828		10.172.219	
Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	7	7	12.000.000	7	8.787.146	7	9.226.503	7	9.687.828	7	10.172.219	
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				435.765.376		220.615.000		220.615.000		220.615.000		220.615.000	
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	2	12	435.765.376	2	220.615.000	2	220.615.000	2	220.615.000	2	220.615.000	
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				315.327.000		60.200.000		60.200.000		60.200.000		60.200.000	
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	12	12	315.327.000	12	60.200.000	12	60.200.000	12	60.200.000	12	60.200.000	
1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan				0		204.600.000		204.600.000		204.600.000		204.600.000	
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan (Dokumen)	0	12	0	12	204.600.000	12	204.600.000	12	204.600.000	12	204.600.000	
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				1.321.650.000		1.453.815.000		1.453.815.000		1.453.815.000		1.453.815.000	

Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	12	12	1.321.650.000	12	1.453.815.000	12	1.453.815.000	12	1.453.815.000	12	1.453.815.000		
1.02.02.2.02.0049 - Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	23	23	0	23	0	23	0	23	0	23	0		
1.02.02.2.02.0050 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				0		30.000.000		33.000.000		36.300.000		50.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	3	3	0	3	30.000.000	3	33.000.000	3	36.300.000	3	50.000.000		
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				144.425.400		116.988.740		128.687.614		141.556.375		155.712.013		
Tercapainya FKRTL dan FKRTL yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	13	12	144.425.400	12	116.988.740	12	128.687.614	12	141.556.375	12	155.712.013		
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				144.425.400		116.988.740		128.687.614		141.556.375		155.712.013		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	13	12	144.425.400	12	116.988.740	12	128.687.614	12	141.556.375	12	155.712.013		
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				154.373.511		392.054.358		419.259.793		474.385.773		521.824.350		
Terlaksananya Rekomendasi Perizinan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	12	12	154.373.511	12	392.054.358	12	419.259.793	12	474.385.773	12	521.824.350		
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	105	115		120		125		130		135			
	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan	27	27		27		27		27		27			

	Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)												
	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	119	129		134		139		144		149		
1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				72.110.401		150.312.492		153.343.741		181.878.115		200.065.927	
Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	119	129	72.110.401	134	150.312.492	139	153.343.741	144	181.878.115	149	200.065.927	
1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				17.338.443		0		0		0		0	
Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	27	27	17.338.443	27	0	27	0	27	0	27	0	
1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				54.924.667		241.741.866		265.916.052		292.507.658		321.758.423	
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	105	115	54.924.667	120	241.741.866	125	265.916.052	130	292.507.658	135	321.758.423	
1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan				10.000.000		0		0		0		0	

Pelayanan Kesehatan Rujukan													
Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	12	12	10.000.000	12	0	12	0	12	0	12	0	
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				1.088.580.146		1.019.728.129		1.075.914.535		1.135.455.262		910.079.000	
Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai standar (%)	100	100	1.088.580.146	100	1.019.728.129	100	1.075.914.535	100	1.135.455.262	100	910.079.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000 Penduduk)	2,3	2,3		2,3		2,3		2,3		2,3		
1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				40.000.000		44.000.000		48.400.000		53.240.000		58.564.000	
Tersedianya Berita acara dan rekomendasi yang dikeluarkan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	4	4	40.000.000	4	44.000.000	4	48.400.000	4	53.240.000	4	58.564.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4		
1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		29.282.000	
Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	4	4	20.000.000	4	22.000.000	4	24.200.000	4	26.620.000	4	29.282.000	
1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		29.282.000	

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	4	4	20.000.000	4	22.000.000	4	24.200.000	4	26.620.000	4	29.282.000		
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				54.781.653		70.000.000		76.500.000		83.650.000		101.515.000		
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Praktek Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	12	12	54.781.653	12	70.000.000	12	76.500.000	12	83.650.000	12	101.515.000		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	120	2.150		2.150		2.150		2.150		2.150			
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	15.000.000		
1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				44.429.760		10.000.000		11.000.000		12.100.000		13.310.000		
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	120	2.150	44.429.760	2.150	10.000.000	2.150	11.000.000	2.150	12.100.000	2.150	13.310.000		
1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				10.351.893		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	12	12	10.351.893	12	55.000.000	12	60.500.000	12	66.550.000	12	73.205.000		
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				993.798.493		905.728.129		951.014.535		998.565.262		750.000.000		
Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah/kabupaten/kota melalui bimbingan teknis, diklat maupun UKOM.	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	5	50	993.798.493	50	905.728.129	50	951.014.535	50	998.565.262	50	750.000.000		
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				993.798.493		905.728.129		951.014.535		998.565.262		750.000.000		
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	5	50	993.798.493	50	905.728.129	50	951.014.535	50	998.565.262	50	750.000.000		
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				1.107.681.878		860.523.950		939.367.612		888.920.965		1.086.376.094		
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dan minuman	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	100	100	1.107.681.878	100	860.523.950	100	939.367.612	100	888.920.965	100	1.086.376.094	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN	
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	80	80		80		80		80		80			

	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	100	100		100		100		100		100			
1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				161.169.661		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pemberian Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengurus perizinan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	50	50	161.169.661	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000		
1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				161.169.661		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	50	50	161.169.661	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000		
1.02.04.2.02 - Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				54.739.341		27.286.627		45.015.290		50.000.000		50.000.000		

Terlaksananya Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	2	3	54.739.341	3	27.286.627	5	45.015.290	5	50.000.000	5	50.000.000		
1.02.04.2.02.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				54.739.341		27.286.627		45.015.290		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	2	3	54.739.341	3	27.286.627	5	45.015.290	5	50.000.000	5	50.000.000		
1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				94.250.779		104.174.673		109.383.407		25.455.159		156.563.707		
Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1	12	94.250.779	12	104.174.673	12	109.383.407	12	25.455.159	12	156.563.707		

1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				94.250.779		104.174.673		109.383.407		25.455.159		156.563.707		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1	12	94.250.779	12	104.174.673	12	109.383.407	12	25.455.159	12	156.563.707		
1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				344.145.042		184.450.662		202.895.728		223.185.301		245.503.831		
Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	3	12	344.145.042	12	184.450.662	12	202.895.728	12	223.185.301	12	245.503.831		
1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah				344.145.042		184.450.662		202.895.728		223.185.301		245.503.831		

Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	3	12	344.145.042	12	184.450.662	12	202.895.728	12	223.185.301	12	245.503.831		
1.02.04.2.05 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				161.275.874		74.611.988		82.073.187		90.280.505		99.308.556		
Terlaksananya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	1	12	161.275.874	12	74.611.988	12	82.073.187	12	90.280.505	12	99.308.556		
1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				161.275.874		74.611.988		82.073.187		90.280.505		99.308.556		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	1	12	161.275.874	12	74.611.988	12	82.073.187	12	90.280.505	12	99.308.556		
1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				292.101.181		320.000.000		350.000.000		350.000.000		385.000.000		

Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	60	75	292.101.181	75	320.000.000	80	350.000.000	80	350.000.000	80	385.000.000		
1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				292.101.181		320.000.000		350.000.000		350.000.000		385.000.000		
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	60	75	292.101.181	75	320.000.000	80	350.000.000	80	350.000.000	80	385.000.000		
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				285.267.539		327.808.000		329.062.000		330.441.000		331.958.300		
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Puskesmas dengan minimal 75 % Posyandu siklus hidup yang aktif (%)	52	58	285.267.539	60	327.808.000	62	329.062.000	64	330.441.000	66	331.958.300	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN	
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				8.604.039		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor dibidang kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	6	12	8.604.039	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000		
1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				8.604.039		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	6	12	8.604.039	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000		

Pemberdayaan Masyarakat														
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		12.540.000		13.794.000		15.173.000		16.690.300		
Terlaksananya kegiatan sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	4	4	0	4	12.540.000	4	13.794.000	4	15.173.000	4	16.690.300		
1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				0		12.540.000		13.794.000		15.173.000		16.690.300		
Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	4	4	0	4	12.540.000	4	13.794.000	4	15.173.000	4	16.690.300		
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				276.663.500		165.268.000		165.268.000		165.268.000		165.268.000		
Terlaksananya Kegiatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0	12	276.663.500	12	165.268.000	12	165.268.000	12	165.268.000	12	165.268.000		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				276.663.500		165.268.000		165.268.000		165.268.000		165.268.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0	12	276.663.500	12	165.268.000	12	165.268.000	12	165.268.000	12	165.268.000		

#### 4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Daerah

Dalam dokumen RPJMD Kota Pontianak 2025–2029 sesuai Visi dan Misi Walikota Pontianak, perumusan program prioritas bidang kesehatan sesuai misi pertama yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dengan program prioritas adalah sebagai berikut:

##### 4.4.1 Program hidup bersih dan sehat

Beberapa subkegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang mendukung p terlaksananya program prioritas ini, yaitu subkegiatan peningkatan pelayanan promosi kesehatan; Subkegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat; Subkegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.

##### 4.4.2 Program Integrasi Layanan Primer

Integrasi layanan primer adalah pendekatan penting dalam sistem kesehatan yang bertujuan untuk menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai layanan kesehatan esensial di tingkat fasilitas kesehatan primer (seperti Puskesmas dan jaringannya) dan melibatkan peran serta masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang komprehensif, berkesinambungan, dan berkualitas kepada individu dan keluarga, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem kesehatan secara keseluruhan. Konsep dasar integrasi layanan primer mencakup beberapa aspek penting:

- a. Pelayanan Komprehensif dan Berkesinambungan: Memastikan individu dan keluarga mendapatkan semua layanan kesehatan yang mereka butuhkan, mulai dari promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, hingga rehabilitasi, tanpa terfragmentasi. Pelayanan

diberikan secara berkesinambungan sepanjang siklus hidup, dari bayi hingga lansia.

- b. Fokus pada Pencegahan dan Promosi Kesehatan: Memberdayakan individu dan komunitas untuk menjaga kesehatan mereka dan mencegah penyakit sebelum timbul. Ini mencakup imunisasi, edukasi gizi, sanitasi lingkungan, dan gaya hidup sehat.
- c. Pendekatan Keluarga dan Komunitas: Pelayanan tidak hanya berfokus pada individu yang sakit, tetapi juga mempertimbangkan konteks keluarga dan komunitas tempat mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat sangat ditekankan.
- d. Peningkatan Akses dan Kualitas: Mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang berkualitas tinggi di fasilitas primer yang dekat dengan tempat tinggal mereka.
- e. Efisiensi dan Efektivitas: Mengurangi duplikasi layanan, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan koordinasi antarprofesi kesehatan dan lintas sektor.
- f. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Menggunakan sistem informasi kesehatan terintegrasi untuk mendukung pencatatan, pelaporan, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan subkegiatan pendukung program prioritas Integrasi Pelayanan Primer adalah keseluruhan subkegiatan yang ada pada program kegiatan urusan wajib bidang kesehatan serta pelaksanaan subkegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

#### 4.4.3 Program Antenatal Berkualiatas

Pelayanan kesehatan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan yang diberikan kepada ibu hamil selama masa kehamilan. Tujuannya adalah memastikan kesehatan optimal bagi ibu dan janin, mendeteksi dini masalah atau komplikasi, mempersiapkan persalinan yang aman, dan

membekali ibu dengan pengetahuan yang cukup untuk merawat bayi setelah lahir.

Pelayanan antenatal berkualitas umumnya mengacu pada Standar 10T, yang mencakup:

1. Timbang Berat Badan dan Ukur Tinggi Badan: Untuk memantau kenaikan berat badan ideal dan mengidentifikasi faktor risiko tinggi badan ibu yang pendek.
2. Ukur Tekanan Darah: Mendeteksi dan memantau hipertensi yang bisa berkembang menjadi preeklampsia.
3. Tentukan Nilai Status Gizi (ukur Lingkar Lengan Atas/LILA): Mengidentifikasi ibu hamil yang berisiko kekurangan energi kronis (KEK) yang dapat memengaruhi pertumbuhan janin.
4. Ukur Tinggi Fundus Uteri: Memantau pertumbuhan janin sesuai usia kehamilan.
5. Tentukan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ): Memastikan posisi janin normal dan mendeteksi adanya gawat janin.
6. Skrining Status Imunisasi Tetanus dan Berikan Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan: Mencegah tetanus pada ibu dan bayi.
7. Beri Tablet Tambah Darah (Fe): Mencegah dan mengatasi anemia pada ibu hamil. Biasanya diberikan minimal 90 tablet selama kehamilan.
8. Pemeriksaan Laboratorium (Rutin dan Khusus): Meliputi pemeriksaan hemoglobin (Hb), golongan darah, skrining penyakit menular seperti HIV, Sifilis, Hepatitis B, dan pemeriksaan lainnya sesuai indikasi (misalnya gula darah).
9. Tatalaksana/Penanganan Kasus: Memberikan penanganan cepat dan tepat jika ditemukan masalah atau komplikasi selama kehamilan. Ini bisa berupa pengobatan, rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap, atau tindakan medis lainnya.
10. Temu Wicara (Konseling): Memberikan edukasi dan konseling yang komprehensif mengenai kesehatan kehamilan, persalinan, gizi, perawatan bayi, dan hal-hal lain yang dibutuhkan ibu dan keluarga.

Subkegiatan pendukung program prioritas ini adalah subkegiatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan subkegiatan pelayanan gizi masyarakat.

#### 4.4.4 Program Penanganan Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bawah lima tahun) akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan (dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun). Penanganan stunting adalah serangkaian upaya terpadu dan multisektoral yang bertujuan untuk mencegah terjadinya stunting baru dan mengatasi kasus stunting yang sudah ada. Kondisi ini menyebabkan anak menjadi lebih pendek dari standar usianya dan memiliki dampak jangka panjang yang serius, antara lain:

- a. Gangguan Perkembangan Otak: Stunting dapat menghambat perkembangan kognitif dan motorik anak, yang berdampak pada kemampuan belajar dan prestasi di sekolah.
- b. Penurunan Produktivitas di Masa Dewasa: Anak yang stunting cenderung memiliki kapasitas kerja yang lebih rendah saat dewasa, sehingga memengaruhi produktivitas ekonomi.
- c. Peningkatan Risiko Penyakit Tidak Menular: Stunting meningkatkan risiko anak menderita penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan hipertensi di kemudian hari.
- d. Penurunan Kekebalan Tubuh: Anak stunting lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit.

Penyebab Multifaktorial: Stunting disebabkan oleh kombinasi kekurangan gizi kronis, sanitasi buruk, akses air bersih yang minim, praktik pengasuhan yang tidak optimal, pendidikan rendah, kemiskinan, dan penyakit infeksi berulang. Tidak ada satu sektor pun yang bisa mengatasi semua faktor ini sendirian. Selain Dinas Kesehatan dalam hal penanganan stunting di Kota Pontianak melibatkan perangkat daerah lain, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan

Perempuan sebagai leading sektor. Adapun subkegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang mendukung dalam program prioritas penanganan stunting adalah subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, pelayanan kesehatan pada ibu hamil, pelayanan kesehatan pada ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir, pelayanan kesehatan pada balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, dan subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan.

#### 4.4.5 Program Penanggulangan TBC

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (yang kemudian diperbarui dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis) Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis. Dalam Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2025-2029 cakupan penemuan kasus Tuberkulosis menjadi salah satu indikator. Hal ini selaras dengan program prioritas pemerintah Kota Pontianak, dan subkegiatan yang mendukung adalah subkegiatan Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis dan subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis.

#### 4.4.6 Program Jaminan Kesehatan Nasional

Program ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, mengamanatkan BPJS

Kesehatan, kementerian/lembaga dan seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota agar bersinergi dan berupaya secara optimal untuk memastikan seluruh penduduk dilindungi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Target cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kota Pontianak tahun 2025 – 2030 sebesar 98%. Subkegiatan yang mendukung program ini adalah subkegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat. Berikut tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Pontianak

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN				
1.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas 1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	

	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	
	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
	1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
	1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
	1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
	1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	

	1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
	1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
	1.02.02.2.02.0024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
	1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
	1.02.02.2.02.0030 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
	1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
	1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	

			1.02.02.2.02.0037 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	
			1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
			1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
			1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
			1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	
			1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
			1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
			1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	
			1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
			1.02.02.2.02.0049 - Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	
			1.02.02.2.02.0050 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
2.	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
			1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
			1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	

			1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
3.	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dan minuman	1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
			1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
			1.02.04.2.02 - Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	
			1.02.04.2.02.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	
			1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
			1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
			1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
			1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
			1.02.04.2.05 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	

			1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
			1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
			1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
4.	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
			1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
			1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan

Melalui kerangka Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Kesehatan Kota Pontianak akan memantau dan mengevaluasi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2025-2029. IKU ini menjadi kunci untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas setiap upaya yang dilakukan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pontianak.

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN									
2.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,46	75,83	76,20	76,57	76,94	77,31	77,68	
3.	Prevalensi Stunting Pada Balita (SSGI)	%	22,3	21	19,6	18,2	16,8	15,4	14	
4.	Jumlah Kematian Ibu	Orang	13	20	19	18	17	16	15	
5.	Jumlah Kematian Balita	Orang	85	110	108	106	104	102	100	
6.	Prevalensi Balita Wasting	%	8,2	8,2	7,9	7,7	7,5	7,2	7	
7.	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	54,74	80	85	90	93	95	95	
8.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	89,61	98	98	98	98	98	98	
9.	Angka keberhasilan pengobatan TB	%	89,7	90	90	90	90	90	90	
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	48,69	100	100	100	100	100	100	
11.	Fasyankes Pemerintah Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	

#### 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan berdaya guna, dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 ini merinci target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk periode 2025-2029. Pencapaian target ini akan diukur secara sistematis melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan. IKK digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi SPM. Dengan kata lain, SPM menetapkan standar minimal yang harus dipenuhi, dan IKK memberikan kerangka kerja terukur untuk menilai apakah standar tersebut sudah tercapai atau belum.

Tabel 4.6  
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
2.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	99.14	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	positif	%	95.73	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	positif	%	92.79	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	positif	%	94.57	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	positif	%	81.89	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Persentase penderita DM yang mendapatkan	positif	%	83.85	100	100	100	100	100	100	

	pelayanan sesuai standar										
11.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
12.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
13.	Persentase warga Negara usia 60 tahun keatas mendapatkan scrining kesehatan sesuai standar	positif	%	73.89	100	100	100	100	100	100	
14.	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	positif	%	2.76	2.79	2.79	2.79	2.79	2.79	2.79	
15.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	positif	%	99.42	100	100	100	100	100	100	

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif dan strategis, yang disusun berdasarkan analisis mendalam terhadap kondisi kesehatan masyarakat Kota Pontianak saat ini, serta proyeksi kebutuhan dan tantangan kesehatan di masa mendatang.

### A. Kesimpulan Penting Substansi

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 adalah dokumen krusial yang menjadi pedoman utama bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. Secara substansi, Renstra ini menegaskan komitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Pontianak yang optimal dan merata, sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kota Pontianak serta kebijakan kesehatan nasional.

Beberapa poin penting yang menjadi fokus Renstra ini antara lain:

1. Fokus pada Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan: Melalui pengembangan infrastruktur kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pemanfaatan teknologi informasi.
2. Penguatan Upaya Promotif dan Preventif: Pencegahan penyakit dan promosi kesehatan menjadi prioritas utama untuk membangun masyarakat yang lebih sehat dan mandiri, mengurangi beban penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup.
3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit: Dengan fokus pada penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.
4. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak: Melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, dan bayi baru lahir, serta peningkatan gizi masyarakat.
5. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi : Melalui peningkatan kapasitas manajemen kesehatan, peningkatan pembiayaan kesehatan, serta peningkatan kerjasama lintas sektor.

### B. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota

Pontianak Tahun 2025-2029 akan didasarkan pada kaidah-kaidah berikut untuk memastikan efektivitas dan efisiensi:

1. Keterpaduan dan Sinergitas: Pelaksanaan program dan kegiatan harus terintegrasi dan bersinergi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan, lintas sektor terkait di tingkat Kota Pontianak, serta pihak swasta dan masyarakat sipil.
  2. Partisipasi Aktif Masyarakat: Pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program kesehatan akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat akan kesehatan.
  3. Berbasis Bukti (Evidence-Based): Setiap kebijakan dan program akan didasarkan pada data dan bukti ilmiah yang akurat untuk memastikan intervensi yang paling efektif dan efisien.
  4. Fleksibilitas dan Responsivitas: Pelaksanaan Renstra harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi dan tantangan yang mungkin timbul, serta responsif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.
  5. Pengalokasian Sumber Daya yang Efisien: Pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana akan dilakukan secara cermat dan efisien untuk mencapai hasil yang maksimal dengan sumber daya yang terbatas.
  6. Akuntabilitas dan Transparansi: Setiap tahapan pelaksanaan program dan kegiatan akan dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- C. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah.

Pengendalian dan evaluasi adalah komponen vital untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan berjalan sesuai target dan mencapai hasil yang diharapkan. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi akan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, meliputi:

1. Pemantauan (Monitoring) Berkelanjutan:  
Mekanisme pemantauan akan dilakukan secara berkala (triwulanan, semesteran) melalui laporan kemajuan, rapat koordinasi, kunjungan lapangan, dan penggunaan sistem informasi kesehatan. Indikator kinerja

utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra akan menjadi acuan utama dalam pemantauan. Hasil pemantauan akan digunakan untuk identifikasi dini permasalahan dan hambatan, serta untuk melakukan koreksi atau penyesuaian yang diperlukan agar pelaksanaan tetap berada pada jalur yang benar.

## 2. Evaluasi Kinerja:

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra. Evaluasi akan dilakukan secara periodik (tahunan dan akhir periode Renstra) melalui analisis data kinerja, survei kepuasan masyarakat, studi kasus, serta penilaian terhadap outcome dan dampak jangka panjang.

Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan, penyusunan rencana tindak lanjut, serta bahan masukan untuk perencanaan di periode berikutnya. Temuan evaluasi akan digunakan untuk mengidentifikasi praktik terbaik, pelajaran yang dapat diambil, dan area yang memerlukan perbaikan.

## 3. Pengendalian Internal:

Bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku, serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan sumber daya. Mekanisme pengendalian intern akan terintegrasi dalam setiap proses bisnis Dinas Kesehatan, termasuk audit internal, review kebijakan, dan pengawasan melekat oleh pimpinan. Tindak Lanjut adanya sistem pelaporan yang jelas untuk temuan audit dan mekanisme koreksi yang cepat dan tepat.

## 4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP):

Bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas kinerja Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan Renstra. Mekanisme melalui penyusunan LAKIP akan dilakukan setiap tahun berdasarkan hasil pengukuran IKU dan evaluasi kinerja. LAKIP akan memuat informasi mengenai capaian sasaran, kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang telah dilakukan.

Dengan penerapan kaidah pelaksanaan serta sistem pengendalian dan evaluasi yang komprehensif ini, diharapkan Renstra Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 dapat terimplementasi secara optimal, membawa dampak positif yang signifikan bagi peningkatan derajat

kesehatan masyarakat Kota Pontianak, dan berkontribusi nyata pada pencapaian tujuan pembangunan daerah. Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2025-2029 ini disusun. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Pontianak. Penyusunan Renstra ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari internal Dinas Kesehatan Kota Pontianak, pemerintah daerah, hingga masyarakat melalui Forum Komunikasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap upaya kita untuk mewujudkan masyarakat Kota Pontianak yang sehat dan sejahtera.

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO